



**ANALISIS KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM PENEGAKAN  
KEDISIPLINAN ANGGOTA POLRI DI POLRES TEGAL KOTA**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata Satu (S1)  
untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Program Studi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh:

**ARYA DIPA PRIATMAJA**

**NPM. 2222600079**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**



**ANALISIS KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM PENEGAKAN  
KEDISIPLINAN ANGGOTA POLRI DI POLRES TEGAL KOTA**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata Satu (S1)  
untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Program Studi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh:

**ARYA DIPA PRIATMAJA**

**NPM. 2222600079**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARYA DIPA PRIATMAJA

NPM : 2222600079

Jenjang : Strata Satu (S1)

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **ANALISIS KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM PENEGAKAN KEDISIPLINAN ANGGOTA POLRI DI POLRES TEGAL KOTA** adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila di kemudian hari ditemukan plagiat atau meniru hasil penelitian orang lain yang tingkat kemiripannya 90% dan muncul permasalahan terkait penelitian yang telah saya lakukan. Maka saya bertanggung jawab terhadap keseluruhan SKRIPSI ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran.

Tegal, 17 Januari 2025  
Pembuat Pernyataan



*Arya Dipa Priatmaja*  
Arya Dipa Priatmaja  
NPM 2222600079



## PERSETUJUAN

### ANALISIS KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM PENEGAKAN KEDISIPLINAN ANGGOTA POLRI DI POLRES TEGAL KOTA

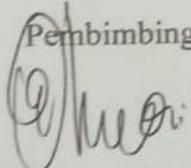
#### SKRIPSI

Diajukan dalam rangka penyelesaian studi Strata S1 untuk mencapai  
Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pancasakti Tegal

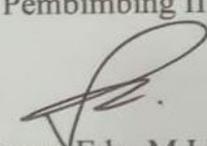
Oleh :

Nama : ARYA DIPA PRIATMAJA  
NPM : 2222600079

Disetujui oleh :

Pembimbing I  


Didi Permadi, M.I.Kom  
NIPY 28267111988

Pembimbing II  


Sarwo Edy, M.I.Kom  
NIPY 27061151985

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi



Sarwo Edy, M.I.Kom  
NIPY 27061151985



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
Jl. Halmahera Km.1 TegalTelp (0283) 323290

## PENGESAHAN

### ANALISIS KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM PENEGAKAN KEDISIPLINAN ANGGOTA POLRI DI POLRES TEGAL KOTA

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Pada hari : Jum'at

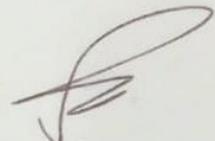
Tanggal : 17 Januari 2025

#### Dewan Penguji :

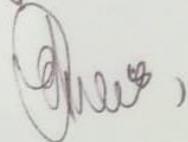
Ketua Dewan Penguji : Ike Desi Florina, M.I.Kom  
NIPY 23768121984

(  )

Anggota Dewan Penguji I : Sarwo Edy, M.I.Kom  
NIPY 27061151985

(  )

Anggota Dewan Penguji II : Didi Permadi, M.I.Kom  
NIPY 28267111988

(  )

Dekan,



  
Dunggul Sugi Harto, S.IP, M.Si  
NIPY 14251921973

## **MOTTO**

- Lakukan yang terbaik untukmu dan keluargamu, semoga Allah dan kebaikan selalu bersamamu.
- Ini hanya tentang perjalanan, jangan pikirkan akhirnya, tetapi nikmati saja prosesnya.
- Sesuatu yang diinginkan itu dikejar, bukan ditunggu. Diusahakan, bukan sekadar mengharapkan
- "Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan" (Sutan Syahrir)
- Melihatlah disaat kamu tidak mendengar, mendengarlh disaat kamu tidak melihat

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah rabbil alamin dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah SWT, sebagai ungkapan terima kasih skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Alm Bapak Supriyono yang telah menjadi sosok panutan terbaik bagi saya dalam menjalani kehidupan dari kecil hingga bisa menjadi seperti sekarang ini.
2. Ibu Cecilia Kusmiyati selaku ibu saya yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, semangat, dan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan tugas skripsi ini dan mewujudkan cita – cita saya. Terima kasih atas pengorbanan ibu yang sangat luar biasa dan terima kasih telah menjadi penyemangat hidup untuk selalu berbuat kebaikan, bekerja keras, jujur, dan disiplin.
3. Kedua kakak saya Happy Kurniawati dan Rina Sulistyowati yang senantiasa memberikan semangat, kasih sayang, doa, dan menjadi contoh terbaik bagi saya dalam berbagai hal.
4. Keluarga besar, saudara – saudara, dan teman – teman dekat saya yang selalu memberi doa dan semangat kepada saya.
5. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Fisip UPS Tegal pada umumnya dan Dosen pembimbing skripsi yaitu Bapak Sarwo Edy dan Bapak Didi Permadi pada khususnya yang telah mendidik, membimbing, berbagi pengalaman, pengetahuan, dan wawasan sehingga saya dapat menyusun tugas skripsi ini dengan baik. Semoga bapak ibu dosen panjang umur, sehat selalu, Prodi Ilmu Komunikasi Fisip UPS Tegal jaya selalu, serta saya tidak akan melupakan jasa – jasa bapak ibu dosen semuanya dalam mendidik saya selama mengikuti perkuliahan di UPS Tegal.

## ABSTRAK

Nama : ARYA DIPA PRIATMAJA NPM : 2222600079 Judul : Analisis Komunikasi Organisasi Dalam Penegakan Kedisiplinan Anggota Polri Di Polres Tegal Kota

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Komunikasi Organisasi dalam penegakan Kedisiplinan Anggota Polri di Polres Tegal Kota.

Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan Komunikasi Organisasi Dalam Penegakan Kedisiplinan Anggota Polri Di Polres Tegal Kota

Hasil penelitian dapat diketahui dari indikator penelitian yaitu Model komunikasi SMCR Berlo yang memiliki 4 (empat) komponen atau elemen utama yang menyokong terjadinya proses komunikasi. Komunikasi Organisasi dalam penegakan Kedisiplinan Anggota Polri di Polres Tegal Kota yaitu Polres Tegal Kota sudah melaksanakan komunikasi organisasi dengan baik. Sumber Komunikasi disampaikan oleh satuan unit Propam. Propam Polres Tegal Kota memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik, serta sikap sangat tegas dalam kegiatan pembinaan atau sosialisasi disiplin anggota kepolisian. Seksi Propam Polres Tegal Kota juga memiliki pengetahuan tentang kedisiplinan yang baik sehingga dapat menyampaikan pesan yang dapat mudah dipahami oleh anggota kepolisian Polres Tegal Kota. Pesan dalam penegakkan kedisiplinan anggota Polres Tegal Kota berisi tentang informasi akan kedisiplinan anggota Polres Tegal Kota. Saluran komunikasi yang dilakukan oleh Polres Tegal Kota dalam penegakkan kedisiplinan anggotanya adalah melalui kegiatan tatap muka langsung dengan anggota pada acara sosialisasi, kegiatan rutin apel pagi dan kegiatan gaktiblin yang kegiatan tersebut dapat langsung dilihat dan didengar oleh semua anggota. Selain itu juga saluran komunikasi yang dilakukan oleh Polres Tegal Kota yaitu melalui media cetak berupa surat dinas yang dikeluarkan oleh Polri sebagai pesan/informasi kepada semua anggota kepolisian, ada juga tulisan yang ditempel pada mading yang tersedia di kantor Penerima komunikasi dalam penegakkan kedisiplinan anggota kepolisian Polres Tegal Kota adalah semua anggota kepolisian serta PNS yang bertugas di wilayah hukum Polres Tegal Kota.

***Kata Kunci : Komunikasi Organisasi, Penegakkan Kedisiplinan***

## **ABSTRACT**

*Name: ARYA DIPA PRIATMAJA NPM: 2222600079 Title: Analysis of Organizational Communication in Enforcing Discipline of Police Members at Polres Tegal City*

*The purpose of this study is to determine Organizational Communication in enforcing Discipline of Police Members at Polres Tegal City.*

*This type of research uses a qualitative research type, namely describing Organizational Communication in Enforcing Discipline of Police Members at Polres Tegal City*

*The results of the study can be seen from the research indicators, namely the SMCR Berlo communication model which has 4 (four) main components or elements that support the communication process. Organizational Communication in enforcing Discipline of Police Members at Polres Tegal City, namely Polres Tegal City has implemented organizational communication well. The source of communication is conveyed by the Propam unit. Propam Polres Tegal City has very good communication skills, as well as a very firm attitude in coaching or socializing police member discipline. The Propam Section of the Tegal Police also has good knowledge of discipline so that it can convey messages that can be easily understood by members of the Tegal City Police. Messages in enforcing discipline for members of the Tegal City Police contain information about the discipline of members of the Tegal City Police. The communication channels carried out by the Tegal City Police in enforcing discipline for its members are through direct face-to-face activities with members at socialization events, routine morning roll calls and gaktiblin activities which activities can be directly seen and heard by all members. In addition, the communication channels carried out by the Tegal City Police are through printed media in the form of official letters issued by the Police as messages/information to all police members, there are also writings that are attached to the wall magazine available at the Tegal City Police office. The recipients of communication in enforcing discipline for members of the Tegal City Police are all police members and civil servants who serve in the jurisdiction of the Tegal City Police.*

***Keywords: Organizational Communication, Discipline Enforcement***

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan berkat, rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Komunikasi Organisasi dalam Penegakan Kedisiplinan Anggota Polri di Polres Tegal Kota Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Unggul Sugi Harto, S.IP, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Sarwo Edy, M.I.Kom, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal dan juga selaku Dosen Pembimbing 2 yang sudah memberikan motivasi dan arahan dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Didi Permadi, M.I.Kom, selaku dosen pembimbing 1 yang selalu membimbing, memberi saran, serta turut berbagi pengalamannya sehingga memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen serta staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPS Tegal yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.

6. Ibu Cecilia Kusmiyati selaku ibu saya yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, semangat, dan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan tugas skripsi ini dan mewujudkan cita – cita saya. Serta Kedua kakak saya Happy Kurniawati dan Rina Sulistyowati yang senantiasa memberikan semangat, kasih sayang, doa, dan menjadi contoh terbaik bagi saya dalam berbagai hal.
7. Teman-Teman seangkatan dan seperjuangan di Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala bantuan, motivasi serta semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan oleh Allah SWT. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti mengharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi para pembaca, khususnya bagi mahasiswa komunikasi maupun peneliti selanjutnya.

Tegal, Januari 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2. Kerangka Teori .....	15
2.2 Definisi Konsep .....	60
2.3 Pokok-pokok Penelitian .....	65

2.4 Alur Pikir .....	66
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Tipe Penelitian .....	67
3.2. Jenis dan Sumber Data .....	69
3.3 Informan Penelitian .....	70
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	72
3.5 Teknik dan Analisa Data .....	74
<b>BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN.....</b>	<b>77</b>
4.1 Gambaran Umum Polres Tegal Kota .....	77
<b>BAB V HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>103</b>
<b>BAB VI PEMBAHASAN.....</b>	<b>118</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>136</b>
7.1 Kesimpulan .....	136
7.2 Saran .....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>139</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel: 1.1 Jumlah Kepolisian Daerah ( Polda )dan Kepolisian Resor ( Polres ) di Indonesia.....	5
Tabel 1.2. Data Wujud Perbuatan Pelanggaran Disiplin Rayon Pekalongan Tahun 2023 .....	9
Tabel 2.2 Variasi signifikan dalam teknik komunikasi (model) .....	23
Tabel 6.1. Data Wujud Perbuatan Pelanggaran Disiplin Rayon Pekalongan Tahun 2023 .....	133
Tabel 6.2. Data Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Rayon Pekalongan Tahun 2023 .....	133
Tabel 6.3. Data Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Rayon Pekalongan Bulan Januari S.D Juni Tahun 2024.....	133

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Unsur-Unsur yang Membentuk Proses Komunikasi.....	17
Gambar 2.2. Proses Komunikasi.....	19
Gambar 2.3 Model Komunikasi Berlo <i>Berlo's SMCR Model of communication</i> .....	46
Gambar 2.4 Alur Pikir.....	66
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Polres Tegal Kota.....	84
Gambar 6.1. Surat Pelaksanaan Gaktibplin dari Polda Jawa Tengah .....	126
Gambar 6.2. Surat Pelaksanaan Gaktibplin dari Kapolres Tegal Kota .....	128

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Sumber terpenting dalam organisasi adalah sumber daya manusia. Unsur manusia merupakan sumber yang paling menentukan seluruh aktivitas organisasi yang telah digariskan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Robbins (1996), organisasi adalah entitas sosial yang sengaja diorganisir, mempunyai batasan reaktif yang dapat dikenali, dan terus berupaya mencapai tujuan. Organisasi memerlukan individu-individu yang berpengetahuan dan berketerampilan tinggi yang bekerja untuk mengelola organisasi sebaik mungkin untuk meningkatkan kinerja seluruh anggotanya agar kegiatan pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan lancar.

Kinerja pegawai dari struktur organisasi yang terbentuk baik dari atasan sampai bawahan dalam sebuah organisasi menjadi faktor penting untuk mencapai tujuannya, karena faktor tersebut memengaruhi cara pengorganisasian tugas dan pengawasan. Kinerja pegawai menurut Budi Setiyawan dan Waridin (2006) adalah hasil kerja pegawai yang dinilai dari segi kuantitas dan kualitas berdasarkan standar kerja yang ditetapkan organisasi. Kinerja yang baik adalah kinerja optimal, atau kinerja yang memenuhi persyaratan organisasi dan memajukan pencapaian tujuan organisasi. Organisasi harus meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya karena akan membantu meningkatkan kinerja anggotanya. Budi Setiyawan dan Waridin (2006) menyatakan bahwa disiplin merupakan syarat

yang diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan tugas sesuai aturan, sehingga mendorong optimalisasi pada pelaksanaan tugas.

Salah satu syarat untuk menumbuhkan disiplin dalam lingkungan organisasi adalah pendelegasian tanggung jawab secara penuh seluruh pegawai, baik dari pimpinan sampai pegawai paling bawah, sehingga semuanya menyadari tanggung jawabnya dan mengetahui kapan dan bagaimana melaksanakannya, serta tujuan yang akan dicapai dan tahu akan segala tanggung jawabnya (Budi Setiyawan dan Waridin, 2006). Oleh karena itu, pengembangan disiplin diperlukan untuk perluasan efisiensi dan ketertiban. Tujuan organisasi yang diinginkan tidak akan tercapai tanpa adanya disiplin yang kuat seluruh elemen organisasi. Aritonang (2005) dan Budi Setiyawan dan Waridin (2006) keduanya mencantumkan disiplin tugas sebagai salah satu kriteria kinerja. Setiap pegawai harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga kedisiplinan dalam menjalankan tugas pekerjaannya, oleh karena itu seluruh pegawai harus mengetahui terhadap peraturan yang ditetapkan dan berbagai sanksi yang akan dikenakan jika terjadi pelanggaran. Menegakkan kedisiplinan sangat penting untuk mencapai keberhasilan pegawai di semua jenis organisasi, termasuk organisasi pemerintah dan swasta.

Komunikasi yang efektif sangat penting bagi seorang pemimpin dalam menggerakkan organisasi. Komunikasi yang buruk akan sulit dan menjadi persoalan. Ada dua alasan kenapa komunikasi yang baik harus diterapkan oleh pemimpin organisasi, yang pertama adalah proses manajemen dari

kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan akan berjalan dengan baik dan tujuan organisasi bisa tercapai. Kedua, Atasan/manager menghabiskan banyak waktu untuk berkomunikasi dengan anggota staf (Handoko, 1997).

Tugas pokok dan fungsi dari seluruh pegawai harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan organisasi. Ada sejumlah faktor yang diyakini mempengaruhi seberapa kinerja pegawai, seperti kepatuhan /kedisiplinan pegawai terhadap peraturan yang ditetapkan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas. Semua sektor harus berkomunikasi, mulai dari tingkat atas hingga terendah.

Dalam kaitannya dengan kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, sumber daya manusia sangatlah penting, terlepas dari apakah organisasi tersebut berorientasi pada profit atau non-profit. Artinya, karena manusia adalah inti dari setiap usaha, maka energi, kreativitas, dan daya cipta mereka merupakan cerminan kualitas bawaan mereka dan harus dimanfaatkan sepenuhnya. Hubungan dan proses kerja diterapkan dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan organisasi yang menyimpang dari rencana. Keprihatinan terhadap sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam organisasi besar seperti Polisi Republik Indonesia karena tujuan organisasi ini adalah penegakan hukum yang adil, sehingga memerlukan etika dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, anggota harus memenuhi sejumlah kualifikasi, termasuk keterampilan komunikasi yang efektif.

Namun demikian, terdapat banyak hambatan institusional dalam penerapannya. Sejumlah permasalahan tersebut terkait dengan buruknya etika kerja anggota dan pekerja serta kurangnya komitmen organisasi. Kinerja pada dasarnya adalah istilah umum yang mengacu pada efektivitas operasional organisasi, komponen-komponennya, dan pegawainya sebagaimana ditentukan oleh standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena komunikasi adalah sarana utama untuk mempengaruhi perubahan perilaku, organisasi mana pun harus menjaga saluran komunikasi mengingat pentingnya disiplin kerja dan komunikasi dalam meningkatkan loyalitas dan kinerja karyawan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum Nasional dan kepolisian negara di Indonesia yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Polri merupakan lembaga Pemerintah yang besar sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian menyatakan bahwa tugas pokok Polri adalah menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengarahannya, dan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan kelembagaan yang signifikan telah terjadi sebagai akibat dari reformasi kewarganegaraan dan cara hidup yang dilakukan Republik Indonesia. Secara khusus, Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbeda dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), telah mengalami transformasi yang signifikan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Polri dibagi menjadi tiga tingkatan: Markas

Besar (Mabes) yang terletak di Pusat, Kepolisian Daerah ( Polda) di tingkat Provinsi dan Kepolisian Resor ( Polres ) yang merupakan wilayah kota atau kabupaten serta di tingkat Kecamatan yaitu Kepolisian Sektor (Polsek).

Adapun jumlah Kepolisian Resor di Indonesia yang berada di bawah Kepolisian Daerah berjumlah 490 kantor.

Tabel: 1.1 Jumlah Kepolisian Daerah ( Polda ) dan Kepolisian Resor ( Polres ) di Indonesia.

No	Kepolisian Daerah (Polda)	Jumlah Kepolisian Resor ( Polres )
1	Banda Aceh	23
2	Bali	9
3	Banten	6
4	Bengkulu	10
5	Jogjakarta	5
6	Gorontalo	6
7	Jambi	10
8	Jawa Barat	22
9	Jawa Tengah	35
10	Jawa Timur	39
11	Kalimantan Barat	14
12	Kalimantan Selatan	13
13	Kalimantan Tengah	14
14	Kalimantan Timur	9
15	Kalimantan Utara	4
16	Kepulauan Bangka Belitung	7
17	Kepulauan Riau	6
18	Lampung	14

19	Maluku	9
20	Maluku Utara	9
21	Metro Jaya	13
22	NTB	10
23	NTT	21
24	Papua	27
25	Papua Barat	10
26	Riau	11
27	Sulawesi Barat	6
28	Sulawesi Selatan	25
29	Sulawesi Tengah	12
30	Sulawesi tenggara	12
31	Sulawesi Utara	15
32	Sumatra Barat	19
33	Sumatra Selatan	17
34	Sumatra Utara	28
	Jumlah	490

*Sumber : Website Polri.go.id*

Kepolisian Republik Indonesia memiliki 11 (sebelas) unit tugas, yang masing – masing unit mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda namun pada dasarnya tugas pokoknya sama yaitu keamanan dan ketertiban pada masyarakat. Sebelas Unit Kepolisian di Indonesia yaitu Brimob (Brigade Mobile), Densus 88 Antiteror, Sabhara (Samapta Bhayangkara), Propam, Labfor, Inafis , Polisi Pariwisata, Polair, Disaster Victim Identification (DVI), Formed Police Unit (FPU) Indonesia, Unit K-9.

Salah satu unit Kepolisian yang bertugas dalam penegakan kedisiplinan internal kepolisian adalah Unit Propam. Propam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal institusi Polri. Dari struktur organisasinya, unit ini terdiri dari 3 (tiga) bidang fungsi dalam bentuk Instansi yaitu, fungsi pertanggungjawaban, fungsi pengamanan, dan fungsi penegakan disiplin atau Provos di lingkungan internal Polri.

Kepolisian menjadi lembaga yang menjadi banyak sorotan dari masyarakat. Diharapkan seluruh anggota Kepolisian dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Namun pada kenyataannya, masih banyak pelanggaran yang diakibatkan oleh tindakan aparat Kepolisian yang merugikan bagi masyarakat, institusi Kepolisian dan anggota kepolisian sendiri. Memburuknya profesionalisme dan disiplin personel Polri kini menjadi perbincangan masyarakat luas. Polri banyak diberitakan di media mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan anggotanya. Pelanggaran yang dilakukan antara lain banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian, adanya oknum Polri yang terlibat tindak pidana, tindakan sewenang-wenang aparat Polri, dan berbagai kejadian lain yang menyoroti kurangnya disiplin aparat. Contoh seperti kasus anggota polisi yang menggunakan Narkoba di Palopo, Tasikmalaya, Sinjai, Luwu Utara dan daerah lain. Kasus penyalahgunaan Senjata Api di Cengkareng yang mengakibatkan 3 warga meninggal, kasus Sambo dan kasus penyalahgunaan senjata api lain yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian. Ini

menunjukkan banyaknya tindakan indisipliner/ketidaksiplinerannya dari anggota Kepolisian terhadap tugasnya. Masyarakat sekarang ini menjadi sangat prihatin dan tingkat kepercayaannya menurun terhadap institusi Kepolisian. Polri yang seharusnya menjadi harapan Masyarakat dalam menjalankan tanggung jawab utamanya, yang antara lain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pengabdian kepada masyarakat, serta menjaga perdamaian masyarakat dengan tetap menghormati hak asasi manusia di rusak dengan tindakan-tindakan indisipliner tersebut.

Kota Tegal memiliki lembaga Kepolisian Resor (Polres) Tegal Kota yang masuk pada rayon Pekalongan di bawah Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah. Kepolisian Resor Tegal Kota memiliki jumlah anggota 509. Sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penegak hukum, tentunya harus dan wajib menjunjung tinggi kedisiplinan yang lebih. Sebagai anggota Kepolisian harus menjunjung tinggi etika Kepolisian yang harus terhindar dari berbagai macam pelanggaran kedisiplinan. Diperlukan langkah dan upaya kedepan yang harus diambil seperti menjaga komunikasi organisasi Kepolisian yang baik dari tingkat atasan sampai bawahan sebagai usaha untuk mencegah terjadinya tindakan indisipliner dari anggota Kepolisian Resort Tegal Kota. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat menjadi tinggi. Berikut data wujud perbuatan pelanggaran disiplin rayon Pekalongan Tahun 2023.

Tabel 1.2. Data Wujud Perbuatan Pelanggaran Disiplin Rayon Pekalongan Tahun 2023

No	SATWIL	Wujud Perbuatan					JUM LAH
		Menurunkan Harkat Dan Martabat Polri	Tidak Masuk Dinas	Pungli	Lahgun Senpi	Tidak Melaksanakan Dinas Sebaik - Baiknya	
1	Res Pekalongan Kota	1	2	0	0	0	3
2	Res Pekalongan Kab	2	1	0	0	0	3
3	Res Batang	1	2	1	0	1	4
4	Res Pemasang	1	0	0	0	0	1
5	Res Tegal Kota	0	0	0	0	0	0
6	Res Tegal	2	3	0	0	0	5
7	Res Brebes	0	0	0	0	0	0

*Sumber : Data Supervisi BIDPROPAM POLDA JATENG*

Dari data tersebut menunjukkan bahwa Anggota Kepolisian Polres Tegal tidak melakukan tindakan/ perbuatan pelanggaran disiplin. Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM PENEGAKAN KEDISIPLINAN ANGGOTA POLRI DI POLRES TEGAL KOTA”**

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Komunikasi Organisasi dalam penegakan Kedisiplinan Anggota Polri di Polres Tegal Kota?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah untuk mengetahui Komunikasi Organisasi dalam penegakan Kedisiplinan Anggota Polri di Polres Tegal Kota.

## **I.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoretis maupun praktis.

### **a. Kegunaan Teoritis**

Dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pengembangan organisasi yang berkaitan dengan komunikasi.

### **b. Kegunaan Praktis**

1) Bagi mahasiswa penelitian ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah, dan juga untuk menambah wawasan khususnya memahami komunikasi organisasi.

2) Bagi Institusi Polri hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pedoman dalam penerapan komunikasi organisasi yang baik dalam upaya penegakan kedisiplinan anggota

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II.1. Penelitian Terdahulu**

Sumber penelitian yang penulis gunakan salah satunya adalah penelitian-penelitian terdahulu sehingga penulis dapat menyempurnakan teori yang diterapkan pada kajian penelitian tersebut. Penulis tidak dapat menemukan penelitian sebelumnya yang memiliki judul yang sama dengan penelitiannya. Penelitian terdahulu dalam tinjauan pustaka berguna bagi peneliti dalam penelitian untuk menentukan langkah-langkah sistematis dari teori yang digunakan. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang bertema sejenis guna melandasi atau sebagai acuan penelitian ini dibuat:

1. Noor Iriady Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Judul penelitian yaitu Strategi Penegakan Disiplin Anggota Polri Di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkarakterisasi dan mengevaluasi kedisiplinan personel Polres Hulu Sungai Selatan (HSS), serta strategi yang digunakan untuk menegakkan disiplin anggota Polri pada institusi yang sama. Selain itu, permasalahan disiplin kepolisian di Kepolisian Daerah Hulu Sungai Selatan (HSS) akan diidentifikasi dan diperiksa.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Daerah Hulu Sungai Selatan (HSS) yang

mengabaikan peraturan perundang-undangan atau kode etik, melanggar hak asasi manusia, dan mengejar keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat. negara. pekerjaan. Jika mempertimbangkan dampak sistem penegakan hukum disiplin yang ada terhadap perilaku, mental, dan sikap moral yang masih negative anggota Polri, menjadi jelas bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan dan justru berbanding terbalik dengan situasi yang merugikan internal Polri. Dengan demikian, tujuan internal Polri antara lain adalah cara untuk menegakkan kedisiplinan dalam organisasi khususnya di Polres Hulu Sungai Selatan, dan konsistensi atau tindakan tegas terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, termasuk anggota Provos yang menyalahgunakan jabatannya.

2. Untung Widodo dengan judul penelitian Pengaruh Komunikasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada SMK Pelita Nusantara 1 - 2 Semarang.

Organisasi memerlukan kinerja karyawan yang kuat untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Disiplin tempat kerja, komunikasi, dan ketepatan waktu merupakan elemen yang mempengaruhi seberapa baik kinerja karyawan. Jaringan komunikasi yang rumit dan hubungannya dengan komunitas manusia. Karena kurangnya ikatan dan variasi geografis, hubungan individu dalam bentuk berbagi informasi atau komunikasi informal lainnya jarang terjadi.

Untuk memaksimalkan fungsi tuntutan, keluhan, dan aspirasi karyawan, memotivasi derajat kedisiplinan, meningkatkan kenyamanan komunikasi, dan meningkatkan kepuasan kerja, hambatan komunikasi lebih lanjut muncul ketika kesulitan muncul dan memerlukan keputusan manajemen sendiri.

3. Titin Afiati dengan judul penelitian Strategi Komunikasi Dinas Kesehatan Pada Program Vaksinasi Covid-19 (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal lakukan pada program vaksinasi Covid-19 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model komunikasi John Middleton untuk membedah strategi komunikasi yang Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal lakukan di lapangan.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Dinas kesehatan kabupaten tegal menggunakan metode sosialisasi vaksinasi Covid-19, yakni secara langsung dengan tatap muka dan secara tidak langsung dengan menggunakan media. Dalam melaksanakan strategi komunikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal sudah cukup efektif, namun perlu memaksimalkan program dan memaksimalkan penyampaiannya dengan melaksanakan pelatihan komunikator.

1.	Judul	Strategi Penegakan Disiplin Anggota Polri Di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS)
	Nama Peneliti	Noor Iriady Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat.
	Metode penelitian	Deskriptif Kualitatif
	Hasil penelitian	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Daerah Hulu Sungai Selatan (HSS)— yang mengabaikan peraturan perundang-undangan atau kode etik, melanggar hak asasi manusia, dan mengejar keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat. negara. pekerjaan.
	Perbedaan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya pada model komunikasi, Objek Penelitian, dan waktu penelitian.
2.	Judul	Pengaruh Komunikasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada SMK Pelita Nusantara 1 - 2 Semarang.
	Nama peneliti	Untung Widodo
	Metode penelitian	Deskriptif Kualitatif
	Hasil penelitian	Jaringan komunikasi yang rumit dan hubungannya dengan komunitas manusia. Karena kurangnya ikatan dan variasi geografis, hubungan individu dalam bentuk berbagi informasi atau komunikasi informal lainnya jarang terjadi.

	Perbedaan	Perbedaan terletak pada strategi yang digunakan, objek penelitian, tempat penelitian serta waktu penelitian.
3.	Judul	Strategi Komunikasi Dinas Kesehatan Pada Program Vaksinasi Covid-19 (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal).
	Nama peneliti	Titin Afiati
	Model penelitian	Deskriptif Kualitatif
	Hasil penelitian	Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal menggunakan metode sosialisasi vaksinasi Covid-19, yakni secara langsung dengan tatap muka dan secara tidak langsung dengan menggunakan media. Dalam melaksanakan strategi komunikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal sudah cukup efektif, namun perlu memaksimalkan program dan memaksimalkan penyampaiannya dengan melaksanakan pelatihan komunikator.
	Perbedaan	Perbedaan terletak pada objek penelitian, tujuan Penelitian, tempat penelitian serta waktu penelitian.

## II.2. Kerangka Teori

### II.2.1. Pengertian Komunikasi

Karena merupakan makhluk sosial, manusia saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Para sarjana sejak ratusan tahun sebelum Masehi telah mengakui pentingnya komunikasi dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Aristoteles adalah salah satu dari

orang-orang ini. Namun penelitian Aristoteles berfokus pada retorika dalam lingkup yang terbatas.

Banyak ahli yang mendefinisikan komunikasi secara berbeda dalam bukunya masing-masing. Kata Latin *communicatio*, yang berarti "hal yang sama", berasal dari kata "komunikasi" atau "komunikasi" dalam bahasa Inggris. Di sini, "sama" mengacu pada konsep yang sama.

Menurut etimologinya, istilah "komunikasi" berasal dari kata kerja Latin *communicatio* yang berarti "menginformasikan atau berpartisipasi". Berikutnya adalah *communicatus* dalam bahasa latin yang berarti kepemilikan atau berbagi. Alternatifnya, *communis* mengacu pada milik bersama atau penerapan universal, sehingga opini *communis* menunjukkan mayoritas atau opini luas (Liliweri, 1991:3). "Siapa mengatakan apa kepada siapa" adalah bagaimana Aristoteles (385–322 SM) mendefinisikan komunikasi dalam bukunya *Rethoric*. Konsep Aristoteles agak mendasar, namun menjadi inspirasi bagi Harold D. Lasswell, seorang ilmuwan politik, yang berusaha mendefinisikan komunikasi secara lebih tepat pada tahun 1948 dengan mengajukan pertanyaan "siapa mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa, dan dengan konsekuensi apa?"

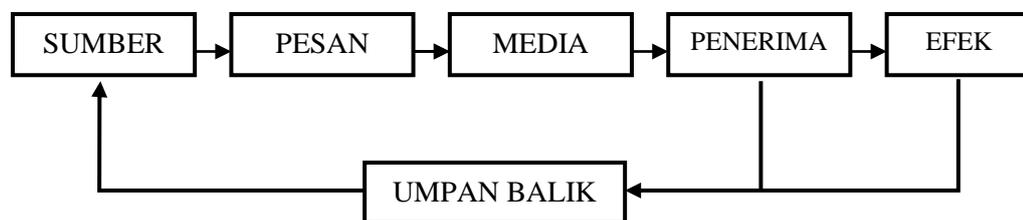
Komunikasi adalah suatu transaksi, suatu proses simbolik yang meminta individu untuk mengendalikan lingkungannya dengan membina hubungan melalui berbagi informasi, memperkuat keyakinan dan

tindakan orang lain, dan berusaha mengubah keyakinan dan tindakan. (Book 1980:23)

Pemahaman timbal balik yang mendalam hanya dapat dicapai melalui proses komunikasi, menurut Rogers dan D. Lawrence Kincaid (1981:49), di mana dua individu atau lebih membentuk atau bertukar informasi. Untuk memahami tujuan komunikasi dan melaksanakannya secara efisien, para pecinta komunikasi sering mengacu pada paradigma Harold Laswell, kadang-kadang dikenal dengan rumus Laswell.

Menurut Laswell, memberikan jawaban atas pertanyaan berikut , Siapa Mengatakan Apa Melalui Saluran Apa Kepada Siapa Dan Dengan Dampak Apa? adalah metode yang berguna untuk menggambarkan proses komunikasi. (Uchjana Onong, 1990:10)

Menurut teori Laswell, komunikasi terdiri dari lima komponen yang masing-masing komponen merupakan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan. Hal ini diilustrasikan dalam diagram berikut:



Gambar 2.1. Unsur-Unsur yang Membentuk Proses Komunikasi

Dalam komunikasi antarmanusia, sumbernya dapat berupa perorangan, namun dapat juga berbentuk kelompok, misalnya partai,

lembaga, atau organisasi. Pengirim, komunikator, sumber, pembuat encode, atau sumber adalah nama umum untuk sumber.

1. Komunikator

Seseorang atau sekelompok orang yang mampu mengkomunikasikan dan memahami suatu konsep.

2. Pesan

Segala sesuatu yang disampaikan pengirim melalui percakapan langsung dengan penerima atau melalui media.

3. Media Sosial. Di sini media adalah sarana penyampaian pesan dalam berbagai format dari pengirim ke penerima.

4. Penerima/Komunikan

Komunikasi yang disampaikan sumber ditujukan kepada pihak tersebut. Satu orang atau lebih dapat menjadi penerima.

5. Pengaruh

Perbedaan antara pikiran, perasaan, dan tindakan penerima sebelum dan sesudah penyampaian pesan dikenal dengan istilah pengaruh atau akibat. Pengetahuan, sikap, dan perilaku seseorang mungkin terpengaruh oleh hal ini (De Fleur, 1982:7)

6. Umpan Balik

Beberapa orang berpendapat bahwa umpan balik itu sendiri adalah semacam pengaruh yang diberikan oleh penerimanya. Meskipun komunikasi mungkin tidak sampai ke penerima atau mungkin menemui hambatan dalam jalurnya, umpan balik juga dapat berasal

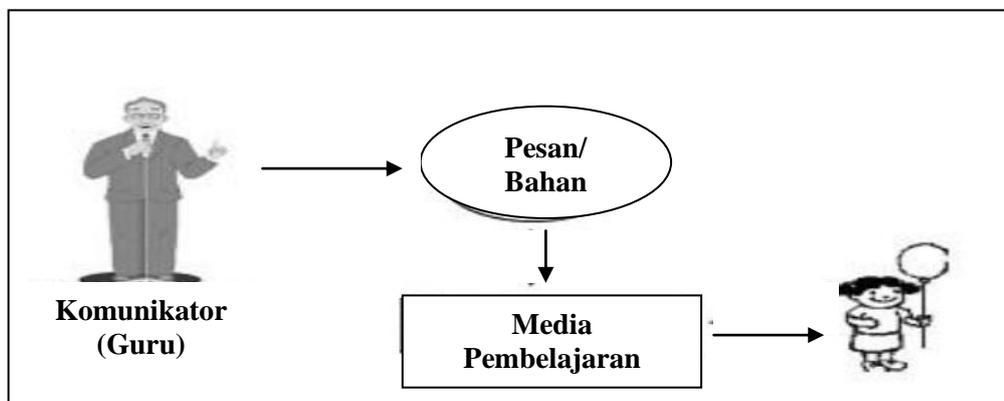
dari sumber lain, seperti media dan pesan. Hal-hal seperti itulah yang menjadi masukan narasumber.

#### 7. Lingkungan sekitar

Keadaan tertentu, seperti situasi atau latar, dapat mempengaruhi bagaimana komunikasi berlangsung. Variabel-variabel ini terbagi dalam empat kategori, khususnya:

- a. Lokasi geografis adalah lingkungan fisik
- b. Variabel sosial budaya, politik, dan ekonomi ditunjukkan pada lingkungan sosial
- c. Lingkungan psikologis: strategi komunikasi yang mempertimbangkan psikologi

Gambar 2.2. Proses Komunikasi



Sumber: <http://lolisetriani-mpd.blogspot.co.id/2015/06/Contoh-bahan-ajar-media-pembelajaran.html>

Berdasarkan definisi unsur-unsur komunikasi yang dikemukakan, terdapat berbagai sudut pandang yang dapat dilihat dari komunikasi, seperti:

a. Komunikasi sebagai Sebuah Proses

Komunikasi yang dimaksud adalah suatu kegiatan yang terjadi secara dinamis jika komunikasi dipahami sebagai suatu proses. Sesuatu yang dikatakan proses berarti komponen pendukungnya bersifat dinamis, aktif, dan tidak statis (Berlo, 1960:25). Metode tersebut menggambarkan bagaimana suatu pesan dikirimkan dari seseorang ke orang lain dalam suasana komunikasi interpersonal, dan menggambarkan bagaimana sebuah penerbit atau stasiun televisi mengirimkan pesan kepada khalayak luas dalam konteks komunikasi massa.

b. Komunikasi Simbolik

Hampir semua penegasan manusia dibuat dalam bentuk simbol-simbol, baik yang dibuat untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Hubungan antara satu orang dan organisasi yang memfasilitasi komunikasi. Simbol merupakan produk komunikasi manusia yang sekaligus menunjukkan keunggulan kebudayaan manusia.

Selain pengaruh budaya, variabel psikologis juga berperan dalam proses pemberian makna terhadap simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi, khususnya ketika penerima menerjemahkan pesan tersebut. Mantan direktur Bank Dunia McNamara (1966:32) pernah menyatakan dalam sebuah ceramah bahwa “kita mempunyai banyak perbedaan dalam hal budaya meskipun kita hidup dalam bahasa yang sama (Inggris).”

c. Tindakan sebagai Komunikasi

Ada yang berpendapat bahwa komunikasi—baik dalam bentuk kata-kata lisan, tulisan, atau gerak tubuh—tidak pernah terjadi dalam ruang hampa. Gerakan diam mungkin juga dianggap sebagai tindakan. Seseorang berinteraksi dengan individu lain karena interaksi merupakan suatu tindakan yang dilakukannya. Tindakan interaksional bergantung pada umpan balik antara individu-individu yang terlibat dalam proses komunikasi jika tindakan tersebut linier karena dilakukan oleh agen komunikasi. Para pelaku komunikasi diposisikan pada tingkat yang sama dan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi satu sama lain dalam situasi tersebut.

d. Komunikasi sebagai Sistem

Menurut Sumprivio (1982:22), suatu sistem umumnya dicirikan sebagai suatu kegiatan di mana semua komponen atau elemen pembantu berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan hasil. Dapat dikatakan bahwa proses komunikasi adalah suatu sistem jika gagasan sistem itu terhubung dengannya, karena ia terdiri dari komponen-komponen yang memfasilitasi saling ketergantungan dan kesatuan integratif. Hubungan yang mengikat komponen ke komponen akan memberikan umpan balik (feedback loops) yang mengarah pada kerjasama sinergis seluruh komponen secara berurutan; artinya, sumber harus dicantumkan sebelum pesan, pesan harus didahulukan sebelum saluran, dan seterusnya. Selain

itu, jika terjadi modifikasi struktural selama proses berlangsung, hal ini akan memengaruhi cara kerja

e. Komunikasi Multidimensi

Ada dua tingkatan yang terlihat ketika melihat komunikasi dari sudut pandang multidimensi: dimensi koneksi dan dimensi konten. Kedua dimensi ini digabungkan dalam komunikasi manusia, dan tidak berdiri sendiri-sendiri satu sama lain. Dimensi relasional menggambarkan bagaimana partisipan komunikasi berinteraksi satu sama lain, sedangkan dimensi konten berfokus pada kata-kata, bahasa, dan informasi yang disampaikan melalui pesan.

Ada berbagai tujuan komunikasi, namun tujuan utamanya adalah untuk:

- a. menyebarkan pengetahuan
- b. menghibur
- c. mendidik
- d. membentuk opini publik.

Secara singkat David K. Berlo dari Michigan State University mengatakan bahwa penggunaan komunikasi sebagai alat interaksi sosial bermanfaat bagi kehidupan seseorang guna menjaga keseimbangan dengan masyarakat (Byrnes, 1965:25).

Komunitas yang bercirikan kesamaan atau kesatuan antar individu, kelompok, dan kelompok lain ditekankan melalui komunikasi.

Kriteria tertentu dapat digunakan untuk membangun situasi komunikasi tambahan ini. Mary B. Cassata dan Molefi K. Asante menyatakan bahwa mereka membedakan tiga bentuk komunikasi yang berbeda: komunikasi massa, komunikasi media, dan komunikasi interpersonal. Ketiga jenis komunikasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Variasi signifikan dalam teknik komunikasi (model)

	<b>ANTARPRIBADI</b>	<b>MASSA</b>	<b>MEDIA</b>
Komunikator	Independen	Organisasi Kompleks	Individu atau organisasi
Pesan	Pribadi atau Terbatas	Umum	Pribadi atau Terbatas
Saluran/ Media	Vokal	Elektronik dan Cetak	Vokal dan elektronik
Khalayak	Individu atau kelompok kecil	Massa	Individu, kelompok kecil atau massa
Umpan Balik	Segera	Tertunda	Segera atau Tertunda
Kontak	Primer	Sekunder	Primer atau sekunder
Contoh	Diskusi keluarga	Berita TV	Telepon

*Sumber: Mary B. Cassata Dan Mofeli K. Asante. Mass Communication: Principles And Practies. New York: Macmillan, 1979, Hlm. 10.*

Selain itu, “komunikasi organisasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal,” menurut Effendy (2009:126).

Komunikasi eksternal adalah komunikasi antara suatu organisasi dengan masyarakat yang terjadi di luar batas-batas organisasi atau instansi,

sedangkan komunikasi internal terjadi dalam lingkup perusahaan atau instansi tersebut. Keduanya akan segera dijelaskan lebih rinci

a. Komunikasi Internal

Dilakukan oleh peserta dalam kelompok resmi dan informal. Komunikasi internal sangat penting untuk penyebaran informasi dalam organisasi karena memungkinkan anggota untuk menyelaraskan pendapat mereka dengan visi dan misi demi kelangsungan hidup organisasi dan tujuan bersama. Membangun identitas organisasi yang kuat dan memberikan rasa memiliki pada setiap pihak internal memerlukan komunikasi internal yang efektif. Ada dua bentuk komunikasi internal, khususnya:

- 1) Komunikasi personal atau interaksi tatap muka adalah proses bertemu seseorang secara tatap muka tanpa memerlukan perantara. Hal ini juga dapat dicapai dengan menggunakan alat komunikasi dan media.
- 2) Komunikasi kelompok mengacu pada interaksi antar kelompok; di sebagian besar bisnis, kita lebih mengenal bagian atau divisi. Dalam situasi seperti ini, kontak tatap muka lebih disukai daripada komunikasi internet, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman.

Berikut ini adalah tujuan komunikasi internal:

- 1) Saluran komunikasi yang berfungsi sebagai alat penyampaian informasi dan penjelasan kebijakan, serta sebagai sumber informasi kebijakan.

- 2) Sebagai komunikator ilmu, mengumpulkan dan memberi masukan.
- 3) Untuk mencegah miskomunikasi dan perselisihan di dalam perusahaan.
- 4) Sebagai transfer harapan terhadap organisasinya dari partai di tingkat bawah ke partai di tingkat yang lebih tinggi.

b. Komunikasi Eksternal

Komunikasi eksternal adalah komunikasi antara pimpinan suatu organisasi atau instansi dengan khalayak di luar organisasi tersebut,” ungkap Effendy (2009: 128). Kepala hubungan masyarakat lebih banyak mengawasi komunikasi di departemen pemerintah, direktorat, lembaga, dan perusahaan besar dibandingkan posisi kepemimpinan lainnya karena luasnya organisasi ini. Hal-hal yang ditangani secara pribadi oleh para pemimpin dibatasi pada hal-hal yang dianggap kritis dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Dua saluran timbal balik yang membentuk komunikasi eksternal adalah komunikasi khalayak dengan organisasi dan komunikasi organisasi dengan khalayak.

1) Upaya hubungan masyarakat yang dilakukan organisasi

Secara umum, informasi dikomunikasikan kepada audiens dengan cara yang membuat mereka merasa terlibat, atau paling tidak, terhubung. Ini adalah tugas penting ketika mencoba menyelesaikan situasi yang tidak terduga.

## 2) Korespondensi publik dengan organisasi

Umpan balik dari masyarakat kepada organisasi merupakan hasil dari upaya penjangkauan yang dilakukan oleh organisasi. Opini publik tercipta ketika informasi yang dibagikan kepada publik menimbulkan kontroversi. Karena opini publik sering kali merugikan perusahaan, diperlukan tindakan cepat untuk mengubahnya. dalam pengertian tradisional, tidak menimbulkan masalah.

Setiap komunikasi memiliki tujuan, baik untuk memberi informasi, mendidik, atau mengubah. Keseluruhan proses komunikasi harus berfungsi dengan baik dan penuh perhatian agar dapat menghasilkan umpan balik atau umpan balik yang positif dari komunikan, yang diperlukan untuk tercapainya tujuan komunikasi. Menurut Den Nimmo, ada berbagai komponen komunikasi, seperti:

1. Komunikator adalah unsur komunikasi ala pembawa pesan. Bagi komunikan, komunikator merupakan sumber informasi. Oleh karena itu, efektivitas suatu komunikasi sangat bergantung pada gaya penyampaian komunikator. Kapasitas komunikator dalam menyampaikan pesan sangat menentukan, termasuk mampu atau tidaknya komunikan menangkap dan memahami pesan tersebut serta respon seperti apa yang diciptakan oleh komunikan.

Agar komunikan dapat menerima pesannya, seorang komunikator harus memiliki beberapa hal berikut:

- Kembangkan keterampilan berbicara dan menulis untuk mengkomunikasikan ide.
  - Pahami pesan yang ingin disampaikan.
  - Mampu menulis konten pesan secara efektif.
  - Memiliki kesadaran dan kebutuhan akan keinginan komunikasi.
  - Memiliki kapasitas untuk memilih media terbaik untuk mengkomunikasikan ide.
  - Memiliki kredibilitas yang kuat di mata komunikator atau audiens.
  - Memiliki kapasitas untuk bereaksi terhadap komentar komunikasi.
2. Pesan adalah konsep, pengetahuan, atau pengumuman yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan ini dapat disampaikan melalui tulisan, visual, kata-kata, atau media lainnya. Pesan berisi konten yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mengubah penerimanya. Pesan-pesan itu sendiri terbagi dalam berbagai kategori, yaitu sebagai berikut:
- Pesan informatif: menyampaikan fakta, informasi, atau jenis informasi lainnya. Komunikasi seperti ini menjadi salah satu acuan komunikasi ketika mengambil keputusan. Contoh dari pesan semacam ini adalah fakta mengenai bencana alam dan jenis bantuan yang dibutuhkan para pengungsi.
  - Pesan yang bersifat persuasif dianggap persuasif. Komunikasi semacam ini bertujuan untuk mengubah pola pikir penerimanya.

Dengan pesan seperti ini yang bersumber dari keinginan komunikasi sendiri, komunikasi dapat mengubah sikapnya tanpa terpaksa. Iklan suatu produk merupakan ilustrasi dari pesan semacam ini.

- Pesan yang ketat. Komunikasi yang memaksa, berbeda dengan komunikasi persuasif, adalah komunikasi yang kuat. Komunikasi semacam ini menggunakan paksaan—seperti pemberian hukuman atau sejenisnya—untuk mencapai tujuannya yaitu mengubah perilaku komunikasi. Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan karyawan merupakan gambaran pesan persuasif.

3. Media Sosial. Salah satu alat atau saluran yang digunakan komunikator untuk menyebarkan pesan adalah media sosial. Saat manusia berkomunikasi, inderanya menerima informasi, yang kemudian diproses oleh pikiran untuk memberikan umpan balik. Secara umum, komunikasi yang disajikan melalui musik dan visual lebih menarik dibandingkan yang disajikan hanya melalui kata-kata tertulis.

Jenis, bentuk, dan karakter pesan yang ingin dikomunikasikan menentukan media atau metode komunikasi yang digunakan. Dua kategori digunakan untuk mengklasifikasikan media komunikasi:

- Media personal disebut juga dengan media interpersonal, merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh dua individu untuk berbicara secara tatap muka atau secara pribadi. Misalnya

media untuk panggilan telepon, aplikasi chatting atau perpesanan seperti Telegram, WhatsApp, Line, dan BBM, atau media untuk video call seperti Skype dan WhatsApp, dan lain-lain.

- Media massa adalah salah satu jenis komunikasi yang menyebarkan pesan kepada khalayak yang lebih luas. Karena penyebarannya yang luas, pesan-pesan yang disebarkan oleh media-media ini biasanya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sejumlah besar individu. Radio, surat kabar, dan televisi adalah beberapa contoh media massa.
4. Komunikan, atau pihak sasaran, adalah pihak yang menerima pesan tersebut. orang yang dipilih komunikator sebagai penerima komunikasi. Individu, kelompok, organisasi, dan entitas lainnya dapat menjadi komunikan. Seorang komunikator yang terampil harus memperhatikan apa yang diungkapkan komunikator dengan baik karena tugas komunikan adalah menangkap apa yang disampaikan komunikator kepadanya.

Untuk mencapai tujuan komunikasi, komunikan harus menyadari hal-hal berikut:

- Kemampuan antarpribadi. Di sini, keterampilan komunikasi mengacu pada kemampuan komunikan dalam membaca, mendengarkan, dan mencatat apa yang didengar dan dibacanya.
- Mentalitas, di sini sikap mengacu pada bagaimana komunikan memandang komunikator dan pesan yang ingin disampaikan.

Misalnya, komunikator sering kali menunjukkan ketidakpedulian ketika seseorang mempunyai asumsi yang tidak menyenangkan, dan sebaliknya.

- Pengetahuan : Tingkat pemahaman komunikasi terhadap pesan yang disampaikan sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan komunikasinya. Misalnya, komunikasi yang memuat informasi mengenai rehabilitasi narkoba terkadang menimbulkan salah tafsir karena kata “rehab” mempunyai konotasi negatif di masyarakat. Hal ini perlu diklarifikasi agar tidak terjadi miskomunikasi.
  - Dalam keadaan normal, indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan penciuman tersedia bagi manusia. Namun, masih ada beberapa orang yang mengalami disabilitas, misalnya tidak bisa melihat atau mendengar. Hal ini penting untuk diperhatikan agar pesan dapat diterima secara efektif.
5. Feedback/Umpan balik atau disebut juga timbal balik adalah jawaban yang diberikan komunikasi terhadap pesan yang diterima dari komunikator. Umpan balik sangat penting untuk mencapai tujuan komunikasi. Umpan balik komunikasi akan menentukan efektif tidaknya komunikasi, diterima atau tidaknya pesan oleh komunikasi, dan tercapai atau tidaknya tujuan komunikasi. Ada dua kriteria yang digunakan untuk mengategorikan umpan balik itu sendiri:

- Tanggapan yang cenderung tidak setuju atau menolak pesan yang diberikan dianggap umpan balik negatif. Tidak berkata apa-apa, menggelengkan kepala, atau semacamnya.
- Jawaban yang menunjukkan komunikasi setuju dengan pesan yang disampaikan dikenal dengan umpan balik positif. Misalnya dengan senyuman, anggukan kepala, atau gestur ekspresif lainnya.

Selain kelima komponen utama di atas, terdapat beberapa komponen tambahan yang dapat menghambat komunikasi, seperti kebisingan atau gangguan. Gangguan yang tidak terduga dan tidak terduga. Misalnya, gangguan yang disebabkan oleh musik keras yang datang dari luar gedung tempat penyampaian pesan, atau gangguan yang disebabkan oleh gempa bumi atau bencana alam lainnya.

- lingkungan, yang terbagi dalam dimensi waktu komunikasi dengan komunikator, lingkungan fisik, lingkungan sosiokultural, dan lingkungan psikologis. Jawaban yang menunjukkan komunikasi setuju dengan pesan yang disampaikan dikenal dengan umpan balik positif. Misalnya dengan senyuman, anggukan kepala, atau gestur ekspresif lainnya.
- Pengkodean dan Interpretasi,  
Proses penyusunan data menjadi pesan oleh komunikator dikaitkan dengan pengkodean. Sedangkan penafsiran komunikasi terhadap pesan yang diterimanya dikenal dengan istilah decoding.
- Pengaruh komunikasi.

Seseorang harus berkomunikasi dengan baik agar komunikan dapat menerima pesan yang disampaikan. Efek komunikasi yang selaras dengan tujuan komunikasi akan dihasilkan dari pesan yang diterima dengan baik oleh komunikan. Akibat dari pesan atau isi yang berbeda, komunikasi yang diubah menjadi interaksi dengan orang lain, atau komunikasi massa disebut dengan efek komunikasi.

Efeknya dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan intensitasnya: perilaku, afektif, dan kognitif.

Apa yang terjadi pada komunikan sehingga menjadikannya lebih cerdas atau berpengetahuan dikenal dengan dampak kognitif. Pesan komunikator ditujukan kepada pikiran komunikan. Dengan kata lain, tujuan komunikator terbatas pada upaya mengubah keyakinan komunikan sendiri.

Dampaknya terhadap afek lebih besar dibandingkan dampaknya terhadap kognisi. Memberi tahu komunikan bukan hanya tujuan komunikator. Namun, hatinya tergerak untuk memunculkan emosi tertentu, seperti simpati, haru, sedih, gembira, murka, dan lain sebagainya.

Dampak tingkat yang lebih tinggi yang dikenal sebagai dampak perilaku memanifestasikan dirinya dalam diri komunikan sebagai bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan.

Oleh karena itu, kehidupan manusia baik individu maupun kolektif tidak dapat dipisahkan dari komunikasi. Interaksi manusia

mencakup komunikasi juga, dan hubungan ini menghasilkan timbal balik atau dampak langsung terhadap masyarakat. Komunikasi langsung dengan orang lain atau penggunaan berbagai platform media massa untuk menjangkau khalayak luas dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi.

Hasil positif dan negatif dari suatu komunikasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain komunikator, pesan, media sosial, komunikan, dan umpan balik atau timbal balik.

Melalui komunikasi, kita dapat terhubung dengan orang lain dan memperluas wawasan kita sekaligus memahami hal-hal yang pada awalnya tidak benar-benar kita pahami atau sulit untuk dihubungkan.

#### II.2.1.1 Proses Komunikasi

Ada dua tahap dalam proses komunikasi: primer dan sekunder.

##### 1) Metode komunikasi utama/primer

Proses seorang komunikator menggunakan simbol-simbol (simbol) sebagai media untuk mengungkapkan pikiran atau perasaannya kepada komunikan dikenal dengan istilah komunikasi primer. Bahasa, tanda, simbol, gambar, warna, dan lain sebagainya merupakan contoh simbol sebagai media utama dalam proses komunikasi. Media ini dapat langsung “menerjemahkan” pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan.

Menurut Effendy (2004:13), suatu komunikasi dikatakan berhasil bila pesan komunikator selaras dengan kerangka acuan komunikan, yaitu gabungan pengalaman dan pemahaman mereka.

## 2) Proses komunikasi secara sekunder

Proses dimana komunikator menggunakan alat atau sarana lain sebagai media kedua penyampaian pesan kepada komunikan setelah terlebih dahulu menggunakan simbol-simbol sebagai yang pertama dikenal dengan proses komunikasi sekunder. Apabila komunikan atau sasarannya berada di lokasi terpencil atau dalam jumlah banyak, maka komunikator akan menggunakan media kedua (Effendy, 2004: 11-16).

### II.2.1.2 Strategi Komunikasi

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen (Setiawan dan Sulkieflimansyah, 2016; 6) strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang akan menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategi atau perencanaan jangka panjang). Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian.

Dalam praktiknya, strategi komunikasi tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan komunikasi karena strategi komunikasi merupakan kiat yang dapat dilakukan dalam melaksanakan perencanaan komunikasi. Dalam penyusunan perencanaan komunikasi ada kalanya perencanaan akan menemui permasalahan-permasalahan seperti teknologi apa yang

akan dipakai untuk membuat system komunikasi menjadi lebih efisien, titik-titik lemah yang akan muncul, bagaimana sistem komunikasi yang ada. Permasalahan- permasalahan tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus karena bisa saja menggoyahkan strategi komunikasi yang telah dibentuk.

Strategi itu sendiri dapat diartikan sebagai rencana dimana strategi dimaknai sebagai sebuah program atau langkah terencana (*a directed course of action*) untuk mencapai serangkaian tujuan yang ditentukan, sama halnya dengan konsep strategi perencanaan.

Menurut Middleton (Cangara, 2013: 61) strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal. Pemilihan strategi merupakan langkah krusial yang memerlukan penanganan secara hati-hati dalam perencanaan komunikasi, sebab jika pemilihan strategi salah satu keliru maka hasil yang diperoleh bisa fatal, terutama kerugian segi waktu, materi, dan tenaga. Oleh karena itu, strategi juga merupakan rahasia yang harus disembunyikan oleh para perencana (Cabgara, 2013: 62)

Strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen (*communications management*) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana

operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi (Effendi, 1981 : 84).

Pendekatan (*approach*) sangat penting terhadap strategi komunikasi karena menimbulkan efek yang diterapkan dari suatu kegiatan komunikasi seperti *information* (informasi), *Persuasion* (persuasi), *instruction* (instruksi).

Sesungguhnya suatu strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional penting terhadap tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Jadi merumuskan strategi komunikasi, berarti memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu) yang dihadapi dan yang akan mungkin dihadapi di masa yang akan datang, guna mencapai efektivitas.

Dengan strategi komunikasi ini, berarti dapat ditempuh beberapa cara memakai komunikasi secara sadar untuk menciptakan perubahan pada diri khalayak dengan mudah dan cepat (Arifin, 1984 : 10).

Dari beberapa pengertian terkait strategi komunikasi menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan mengenai pengertian strategi komunikasi ;

- a. Strategi merupakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan.
- b. Strategi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi
- c. Strategi merupakan keseluruhan keputusan kondisional

Menurut Effendy (2006:35-39) Kolerasi antara komponen dalam strategi komunikasi yaitu:

- 1) Mengenali sasaran komunikasi
- 2) Pemilihan media komunikasi
- 3) Pengkajian tujuan pesan komunikasi
- 4) Peranan komunikator dalam komunikasi

Dalam penetapan strategi perencanaan komunikasi harus berpegangan pada elemen dari komunikasi itu sendiri, yaitu *who says, to whom, through what channel, and what effects*. Dengan berpegangan kepada elemen komunikasi tersebut maka akan diketahui bahwa dalam berkomunikasi terdapat beberapa unsur yang tidak dapat ditinggal, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek yang dimunculkan. Selain memperhatikan unsur-unsur tersebut, sebelum menjalankan strategi komunikasi terlebih dahulu diawali dengan beberapa langkah yaitu, memilih dan menetapkan komunikator, menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak, teknik menyusun pesan, dan memilih media atau saluran komunikasi.

Ada empat faktor penting yang harus diperhatikan menyusun strategi komunikasi :

1. Mengenal khalayak. Khalayak itu aktif sehingga antara komunikator dengan komunikan bukan saja terjadi saling hubungan, tetapi juga saling mempengaruhi.

2. Menyusun pesan, yaitu menentukan tema dan materi. Syarat utama dalam mempengaruhi khalayak dari pesan tersebut ialah mampu membangkitkan perhatian. Awal efektivitas dalam komunikasi ialah bangkitnya perhatian dari khalayak terhadap pesan-pesan yang disampaikan.
3. Menetapkan metode, dalam hal ini metode penyampaian yang dapat dilihat dari dua aspek yaitu:
  - a. Menurut cara pelaksanaannya :
    - *Metode Redudancy (repetition)*  
yaitu cara mempengaruhi khalayak dengan jalan mengulang-ulang pesan pada khalayak.
    - *Metode Canalizing (menyalurkan)*  
yaitu cara mempengaruhi khalayak untuk menerima pesan yang di sampaikan, kemudian secara perlahan-lahan merubah sikap dan pola pemikirannya ke arah yang kita hendaki.
  - b. Menurut bentuk isinya :
    - *Metode Informatif*  
yaitu lebih ditujukan pada penggunaan akal pikiran khalayak dan dilakukan dalam bentuk pertanyaan berupa: keterangan, penerangan, berita, dsb.
    - *Metode Persuasif*  
yaitu mempengaruhi khalayak dengan jalan membujuk, dalam hal ini khalayak digugah baik pikiran maupun perasaannya.

- *Metode Edukatif*

yaitu memberikan suatu ide kepada khalayak berdasarkan fakta-fakta, pendapat dan pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi kebenarannya dengan disengaja, teratur dan berencana dengan tujuan mengubah tingkah laku manusia ke arah yang di inginkan.

- *Metode Kursif*

yaitu mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa tanpa memberi kesempatan berpikir untuk menerima gagasan-gagasan yang dilontarkan, dimanifestasikan dalam bentuk peraturan-peraturan, intimidasi dan biasanya dibelakangnya berdiri kekuatan tangguh.

4. Pemilihan media komunikasi. Kita dapat memilih salah satu atau gabungan dari beberapa media, bergantung pada tujuan yang akan dicapai, pesan yang disampaikan dan teknik yang dipergunakan, karena masing-masing medium mempunyai kelemahan-kelemahannya tersendiri sebagai alat.

#### II.2.1.3. Tujuan Strategi Komunikasi

Untuk mencapai tujuan sebuah instansi maupun organisasi memerlukan strategi dalam bertindak. Strategi yang tepat akan menentukan tercapainya tujuan tersebut.

R Wayne Pace, Brent. D. Petersen dan M. Dallas Burnett dalam bukunya “Theniquet for Effective Communication” menyatakan bahwa tujuan sentral dari strategi komunikasi adalah :

- a. *To secure understanding*: komunikasi mengerti pesan yang disampaikan.
- b. *To establishes acceptance*: pembinaan kepada penerima setelah pesan dimengerti dan diterima.
- c. *To motivation action*: memotivasi kegiatan organisasi.

Beberapa penulis Stainer, Barry, Freeman dan Roering Bryson, dalam Stoner (1989:78) berkeyakinan bahwa strategi dapat membantu suatu organisasi dalam:

1. Berpikir strategis dan mengembangkan strategi yang efektif.
2. Memperjelas arah masa depan.
3. Menciptakan prioritas.
4. Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan.
5. Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan.
6. Menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidang-bidang yang berada dibawah kontrol organisasi.
7. Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi.
8. Memecahkan masalah organisasi.
9. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif.
10. Membangun kerja kelompok dan keahlian.

Strategi komunikasi banyak menentukan keberhasilan dalam kegiatan komunikasi. Dalam menyusun strategi komunikasi seorang pemimpin harus memahami fungsi strategi komunikasi baik secara makro maupun mikro. Dengan pendekatan makro berarti organisasi dipandang struktur global yang berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan dengan pendekatan mikro lebih memfokuskan kepada komunikasi dalam unit dan sub unit pada suatu organisasi. Komunikasi yang diperlukan pada tingkat ini adalah komunikasi antara anggota kelompok, komunikasi untuk memberi orientasi dan latihan, komunikasi untuk menjaga iklim, komunikasi dalam mensupervisi dan pengarahan pekerjaan dan komunikasi untuk mengetahui rasa kepuasan dalam bekerja (Muhammad, 2008: 75-76).

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis menyimpulkan kesimpulan bahwa suatu strategi komunikasi bisa berhasil jika memperhatikan tujuan dari komunikasi yang dilakukan dan memperhatikan *"to secure understanding"*, memastikan bahwa komunikan mengerti pesan yang ia terima *"to establish acceptance"*, bila pesan telah diterima dan dimengerti maka pesan tersebut harus dibina *"to motivate action"* kemudian di motivasi untuk mampu melaksanakan pesan tersebut.

#### II.2.1.4. Model Komunikasi

Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen

komunikasi dengan komponen lainnya (Arni Muhammad, 1992. Komunikasi Organisasi: 5)

Model adalah kerangka kerja konseptual yang menggambarkan penerapan teori untuk kasus-kasus tertentu. Sebuah model membantu kita mengorganisasikan data data sehingga dapat tersusun kerangka konseptual tentang apa yang akan diucapkan atau ditulis.

David Crystal dalam buku *A Dictionary of linguistics phonetics* kerap memodelkan komunikasi melalui definisi, komunikasi terjadi ketika informasi yang sama maksudnya dipahami oleh pengirim dan penerima.

Menurut B. Aubrey Fisher mengatakan model adalah analogi yang mengabstrasikan dan memilih bagian dari keseluruhan, unsur, sifat, atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model. Model adalah gambaran informasi untuk menjelaskan atau menerapkan teori, dengan kata lain, model adalah teori yang lebih disederhanakan.

Werner J. Severin dan James W. Tankard Jr mengatakan model membantu merumuskan teori dan menyarankan hubungan. Oleh karena hubungan antara model dengan teori begitu erat, model sering dipadukan dengan teori. Model dapat berfungsi sebagai basis bagi teori yang lebih kompleks, alat untuk menjelaskan teori dan menyarankan cara-cara untuk memperbaiki konsep-konsep (Deddy Mulyana. 2008. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar : 131)

## 1. Fungsi Model Komunikasi

Menurut Gordon Wiseman dan Lary Barker mengemukakan bahwa ada tiga fungsi model komunikasi, yang pertama yakni melukiskan suatu proses komunikasi, kedua menunjukkan hubungan visual, dan ketiga membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. (Ardiato, Elvinaro, dkk, Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2007 : 68)

Deutsch mengatakan bahwa model mempunyai empat fungsi, pertama mengorganisasikan (kemiripan data dan hubungan) yang tadinya tidak teramati, kedua heuristic (menunjukkan fakta-fakta dan metode baru yang tidak diketahui), ketiga prediktif, hingga yang keempat yaitu mengukur fenomena yang diprediksi.

## 2. Teori Komunikasi S-M-C-R

Teori Komunikasi Berlo SMCR merupakan suatu model komunikasi yang dinamis dalam proses komunikasi yang mencakup unsur-unsur yang lebih dari sekedar bahan saja dalam rangka mentransmisikan pesan dari sumber penerima.

Dalam model komunikasi David K. Berlo (Berlo, 1960:5) diketahui bahwa komunikasi terdiri dari 4 proses yang utama yaitu SMCR (*Source, Message, Channel, dan Receiver*). Berikut penjelasan proses utama SMCR :

### a. *Source* (sumber)

Sumber atau bahan adalah seseorang atau bahan yang mengandung pesan, bisa disebut sebagai komunikator. Walaupun sumber biasanya melibatkan individu, namun dalam hal ini sumber atau bahan juga melibatkan banyak individu. Misalnya seperti dalam organisasi, partai, atau lembaga tertentu.

b. *Message* (pesan)

Pesan adalah semua informasi yang akan disampaikan oleh sumber kepada penerima. Pesan bersifat menghibur, informative, edukatif, persuasif, namun juga bisa bersifat propaganda. Pesan dapat disampaikan melalui 2 cara yaitu verbal dan nonverbal, serta bisa dilakukan dengan cara tatap muka atau melalui sebuah media komunikasi.

c. *Channel* (Media dan Saluran Komunikasi)

Saluran adalah semua indra (mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah) yang dapat digunakan oleh penerima di dalam menerima pesan dari sumber. Sebuah saluran komunikasi terdiri dari 3 bagian yaitu lisan, tertulis, dan elektronik. dan media adalah alat untuk mengirimkan pesan tersebut. misalnya secara personal (komunikasi interpersonal) maka media komunikasi yang digunakan adalah panca indra atau bisa memakai media telepon, telegram, handphone, dimana media ini bersifat pribadi. Sedangkan komunikasi yang bersifat massa (komunikasi massa), dapat menggunakan media cetak (koran, surat, kabar, majalah, dll) sedangkan media elektronik dapat menggunakan

internet, TV, dan radio. Namun untuk internet termasuk media yang fleksibel, karena bisa bersifat pribadi dan bisa bersifat massa.

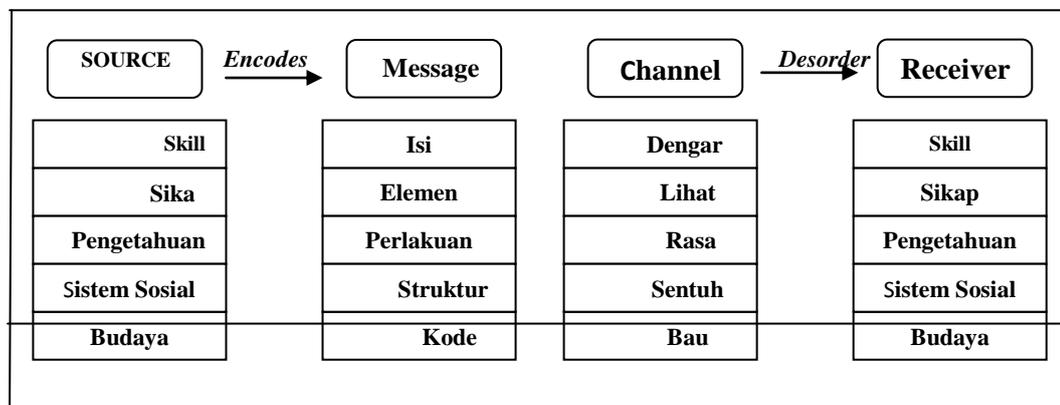
d. *Receiver* (Penerima Pesan)

Penerima adalah orang yang menerima pesan dari sumber. Penerima merupakan elemen yang paling penting dalam menjalankan sebuah proses komunikasi, karena penerima menjadi sasaran dari komunikasi tersebut.

Menurut (Berlo, 1960:10) sumber dan penerima dapat dipengaruhi oleh faktor- faktor seperti keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Pesan yang dikembangkan berdasarkan elemen, struktur, isi, perlakuan, dan kode. Model komunikasi Berlo ini lebih bersifat organisasional dari pada mendeskripsikan proses karena tidak menjelaskan umpan balik.

Salah satu kelebihan model komunikasi Berlo adalah tidak terbatas pada komunikasi publik atau massa, namun juga komunikasi antar pribadi dan berbagai bentuk komunikasi tertulis. Model komunikasi Berlo juga bersifat heuristic (merangsang penelitian), karena merinci dalam unsur-unsur komunikasi tersebut. Namun juga menyajikan komunikasi sebagai fenomena yang statis ketimbang yang dinamis dan terus berubah.

Gambar 2.3 Model Komunikasi Berlo *Berlo's SMCR Model of communication*



Sumber Gambar : Berlo, D. (1960) *The Process Of Communication An Theori And Practice*

Berlo menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi setiap elemen yang dimiliki individu dalam proses komunikasi guna membuat komunikasi menjadi lebih efisien. Model komunikasi Berlo menekankan pada proses *encoder* dan *decoder*. *encoder* artinya menyandi atau memformulasikan pesan, dan hal ini dilakukan oleh yang pengirim pesan. Sedangkan *decoder* artinya membaca sandi atau menerjemahkan pesan. *Encoder* bertanggung jawab mengekspresikan maksud sumber dalam bentuk suatu pesan. Dalam situasi tatap muka, fungsi penyandian dilakukan lewat mekanisme vocal dan sistem otot sumber yang menghasilkan 70 pesan verbal dan nonverbal. Akan tetapi, mungkin juga terdapat seorang lain yang menyandi suatu pesan (Mulyana, 2004:150).

Model Berlo menurut (Haryani, 2001 : 42) sumber dan penerima pesan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya seperti keahlian komunikasi., sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Pesan yang disampaikan oleh komunikator meliputi isi, elemen, perlakuan, struktur,

dan kode. Seorang komunikator atau penerima pesan memperoleh pesan melalui panca inderanya yaitu pendengaran, penglihatan, sentuhan, penciuman, pengecapan.

Mengenali sasaran komunikasi, sesuai dengan teori Berlo yang lebih lengkap menjelaskan suatu proses komunikasi. Sumber dan penerima pesan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya seperti keahlian komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Pesan yang disampaikan oleh komunikator meliputi isi, elemen, perlakuan, struktur, dan kode. Seorang komunikator atau penerima pesan memperoleh pesan melalui panca inderanya yaitu pendengaran, penglihatan, sentuhan, penciuman, dan pengecapan. Melalui konsep-konsep ini peneliti akan lebih dapat mempertajam analisis mengenai penerapan strategi komunikasi.

### 3. Komunikasi Organisasi

Menurut Goldhaber (1986) komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah.

Ron Ludlow mengemukakan pendapat bahwa komunikasi organisasi adalah suatu program komunikasi pada kajian bidang Public Relations (PR) mengenai hubungan internal serta hubungan pemerintah dan hubungan investor dalam organisasi.

Sedangkan, Devito berpendapat bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah usaha mengirim serta menerima pesan baik dalam kelompok formal maupun informal dalam suatu organisasi.

Katz dan Kahn berpendapat pula bahwa komunikasi organisasi adalah sebuah pengiriman dan atau pertukaran informasi dalam suatu organisasi, sehingga dapat membentuk arus informasi. Adanya komunikasi organisasi dapat memunculkan jaringan informasi dalam organisasi tersebut.

#### II.2.2. Polisi Republik Indonesia

Pengertian Polisi Istilah polisi berasal dari kata politea yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha negara, tidak terkecuali urusan keagamaan. Pada saat itu negara Yunani terdiri dari kotakota yang dinamakan "Polis". Jadi pada zaman itu arti polisi demikian luasnya bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga didalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya, termasuk dalam urusan pemerintahan.

Istilah Polisi Republik Indonesia berbeda-beda dalam setiap negara, untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri. Misalnya di Inggris dikenal dengan Constable, di Amerika Serikat dikenal istilah Sherrif yang sebenarnya berasal dari bangunan sosial Inggris, Polizei di Jerman , polizia di Italia

dan politie di Negeri Belanda dan istilah Polri dalam bahasa Indonesia merupakan hasil proses Indonesia dari istilah Belanda.

“Kepolisian” dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian diartikan sebagai segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan .

#### 1. Tugas dan Kewenangan Polri

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin kermanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya;

- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan / atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Tugas utama polisi untuk menegakkan hokum, berhubungan dengan peran polisi sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, polisi berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain tugas dan wewenang yang disebutkan di dalam UU Kepolisian ini, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan umum, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Tindakan menurut penilaian sendiri ini hanya data dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan tugas dan kewenangan Polri secara umum menurut KUHAP adalah :

- a. Wewenang Penyidik
  - b. Penangkapan
  - c. Penahanan
  - d. Penyitaan
2. Kode Etik Polri

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno Ethos, yang dalam bentuk tunggal berarti adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari Ethos adalah Ta etha artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.<sup>17</sup> Menurut Sumaryono, Etika mempunyai arti adat istiadat dan kebiasaan yang baik. Bertolak dari pengertian ini kemudian etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perilaku manusia dalam kehidupan pada umumnya. Selain itu, etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran manusia. Berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia. Berdasarkan perkembangan arti tadi, etika dapat dibedakan menjadi etika perilaku dan etika moral.

### 2.2.3. Pengertian Disiplin Polri

Menurut Simamora (1997) disiplin adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku (Rivai, 2004). Hasibuan (2004) berpendapat bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku.

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa disiplin kerja merupakan suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, dan bila melanggar akan ada sanksi atas pelanggarannya. Budi Setiyawan dan Waridin (2006) dalam Mohammad (2005), ada 5 faktor dalam penilaian disiplin kerja terhadap pemberian layanan pada masyarakat, yaitu:

- a. Kualitas kedisiplinan kerja, meliputi datang dan pulang yang tepat waktu, pemanfaatan waktu untuk pelaksanaan tugas dan kemampuan mengembangkan potensi diri berdasarkan motivasi yang positif.
- b. Kuantitas pekerjaan meliputi volume keluaran dan kontribusi
- c. Kompensasi yang diperlukan meliputi : saran, arahan atau perbaikan.
- d. Lokasi tempat kerja atau tempat tinggal.

- e. Konservasi meliputi penghormatan terhadap aturan dengan keberanian untuk selalu melakukan pencegahan terjadinya tindakan yang bertentangan dengan aturan.

Terdapat empat perspektif daftar yang menyangkut disiplin kerja menurut Rivai (2004):

1. Disiplin retributive (retributive discipline) yaitu berusaha menghukum orang yang berbuat salah.
2. Disiplin korektif (corrective discipline) yaitu berusaha membantu karyawan mengoreksi perilakunya yang tidak tepat.
3. Perspektif hak-hak individu (individual right perspective) yaitu berusaha melindungi hak-hak dasar individu selama tindakan-tindakan disipliner.
4. Perspektif utilitarian (utilitarian perspective) yaitu berfokus kepada penggunaan disiplin hanya pada saat konsekuensi-konsekuensi tindakan disiplin melebihi dampak- dampak negatifnya.

Rivai (2004) juga menyebutkan ada tiga konsep dalam pelaksanaan tindakan disipliner, yaitu:

1. Aturan tungku panas yaitu pendekatan untuk melaksanakan tindakan disipliner.
2. Tindakan disiplin progresif yaitu untuk memastikan bahwa terdapat hukum minimal yang tepat terhadap setiap pelanggaran.
3. Tindakan disiplin positif yaitu dalam banyak situasi, hukuman tindakan memotivasi karyawan mengubah suatu perilaku.

Machmud (2001) memberi pengertian disiplin kerja adalah suatu kekuatan yang berkembang dari dalam tubuh yang berdasarkan atas kesadaran pegawai terhadap peraturan yang menyangkut waktu dan perbuatan pada perusahaan.

Atmosudirdjo (2001) menjelaskan disiplin kerja adalah ketaatan yang sifatnya impersonal tidak memakai perasaan dan tidak memakai perhitungan pamprih atau kepentingan pribadi. Disiplin kerja adalah satu-satunya jalan atau saran untuk mempertahankan adanya atau eksistensi daripada organisasi. Jadi disiplin ini, merupakan factor keteladanan dan ketaatan pengaturan yang merupakan pengejawantahan dari system pendekatan secara psikologis dan pendekatan secara formal.

Pendekatan psikologis seperti pemberian contoh teladan, pemberian nasehat dan usaha apabila tidak dapat mengubah sikap untuk berdisiplin maka barulah dilakukan pendekatan formal kepada pegawai atau karyawan. Dalam pendekatan formal, kepada yang bersangkutan diberikan aturan organisasi sampai pada sangsi terakhir yaitu pemberhentian.

Disiplin berasal dari bahasa latin *discipline*, yang berarti instruksi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003, Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disiplin dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk

menerima sanksisanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

Pendapat lain merumuskan bahwa disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Ankom wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan. Karena itu dalam setiap penjatuhan tindakan atau hukuman disiplin, hendaknya para Ankom harus pula mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar disiplin, dan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional, yang punya dampak merusak kredibilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya. Meskipun telah disusun peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dengan sebaik mungkin, namun keberhasilan penerapannya akan

ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat.

Dasar Hukum Penegakan Disiplin Polri Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2003, yang termasuk Tindakan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah.
- 2) Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara.
- 3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Menyimpan rahasia negara dan / atau rahasia jabatan dengan sebaikbaiknya.
- 5) Hormat-menghormati antar pemeluk agama.
- 6) Menaati peraturan perundangundangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.
- 7) Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan / atau merugikan negara / pemerintah. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat.

8) Berpakaian rapi dan pantas.

Kewajiban Polri Kewajiban bagi anggota Polri dalam PP No. 2 Tahun 2003 dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kewajiban yang harus dilakukan dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dan kewajiban yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas.

Kewajiban bagi anggota Polri dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat diatur dalam Pasal 3 PP No. 2 Tahun 2003, yang berbunyi : Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan Negara;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Menyimpan rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaikbaiknya;
- e. Hormat-menghormati antar pemeluk agama;
- f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. Menaati peraturan perundangundangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;

- h. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan Negara/pemerintah;
- i. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;
- j. Berpakain rapi dan pantas.

### **II.3. Definisi Konsep**

Definisi konsep pada penelitian ini adalah :

1. Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antarsesama manusia melalui pertukaran informasi, untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku
2. Kedisiplinan merupakan suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, dan bila melanggar akan ada sanksi atas pelanggarannya.

Kedisiplinan Anggota Kepolisian berkaitan dengan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik serta larangan yang harus dihindari.

Kewajiban bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tugas, diatur dalam Pasal 4 PP No. 2 Tahun 2003 yang berbunyi, dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

- b. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
- c. Mentaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- g. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- h. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- i. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
- j. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- k. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
- l. Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
- m. Menaati ketentuan jam kerja;
- n. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaikbaiknya;

- o. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

Larangan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam pasal 6 PP Nomor 2 Tahun 2003 yaitu :

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. Membocorkan rahasia operasi kepolisian;
- b. Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan
- c. Menghindarkan tanggung jawab dinas;
- d. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
- e. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;
- f. Mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;
- g. Menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;
- h. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;
- i. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
- j. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
- k. Memanipulasi perkara;
- l. Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan;
- m. Mengurusi, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- n. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara;

- o. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
- p. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- q. Menyalahgunakan wewenang;
- r. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- s. Mertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- t. Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
- u. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- v. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;
- w. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- x. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bentuk pelanggaran berat Anggota Kepolisian adalah :

- a. Terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengubah, mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tidak sah.
- b. Terlibat dalam kegiatan menentang kebijakan pemerintah.

- c. menjadi anggota atau pengurus organisasi atau kelompok yang dilarang pemerintah.
- d. menjadi anggota atau pengurus partai politik.
- e. Menggunakan hak memilih dan dipilih.
- f. Melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
- g. Mendukung, mengikuti, atau menjadi simpatisan paham/aliran terorisme, atau ekstrimisme berbasis kekerasan yang dapat mengarah pada terorisme; dan/atau
- h. Mendukung, mengikuti, atau menjadi simpatisan eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama.

Hukuman/Sanksi disiplin Anggota Kepolisian jika melakukan pelanggaran berupa :

1. Teguran tertulis.
  2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
  3. Penundaan kenaikan gaji berkala.
  4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
  5. Mutasi yang bersifat demosi.
  6. Pembebasan jabatan.
  7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
3. Polisi diartikan sebagai segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

4. Komunikasi Organisasi dalam penegakan Kedisiplinan Anggota Polri di Polres Tegal Kota adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungan Kepolisian dengan membangun hubungan antar anggota Kepolisian Resort Tegal Kota melalui pertukaran informasi, untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku guna meningkat kedisiplinan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis serta menjauhkan dari pelanggaran yang akan berakibat mendapatkan sanksi.

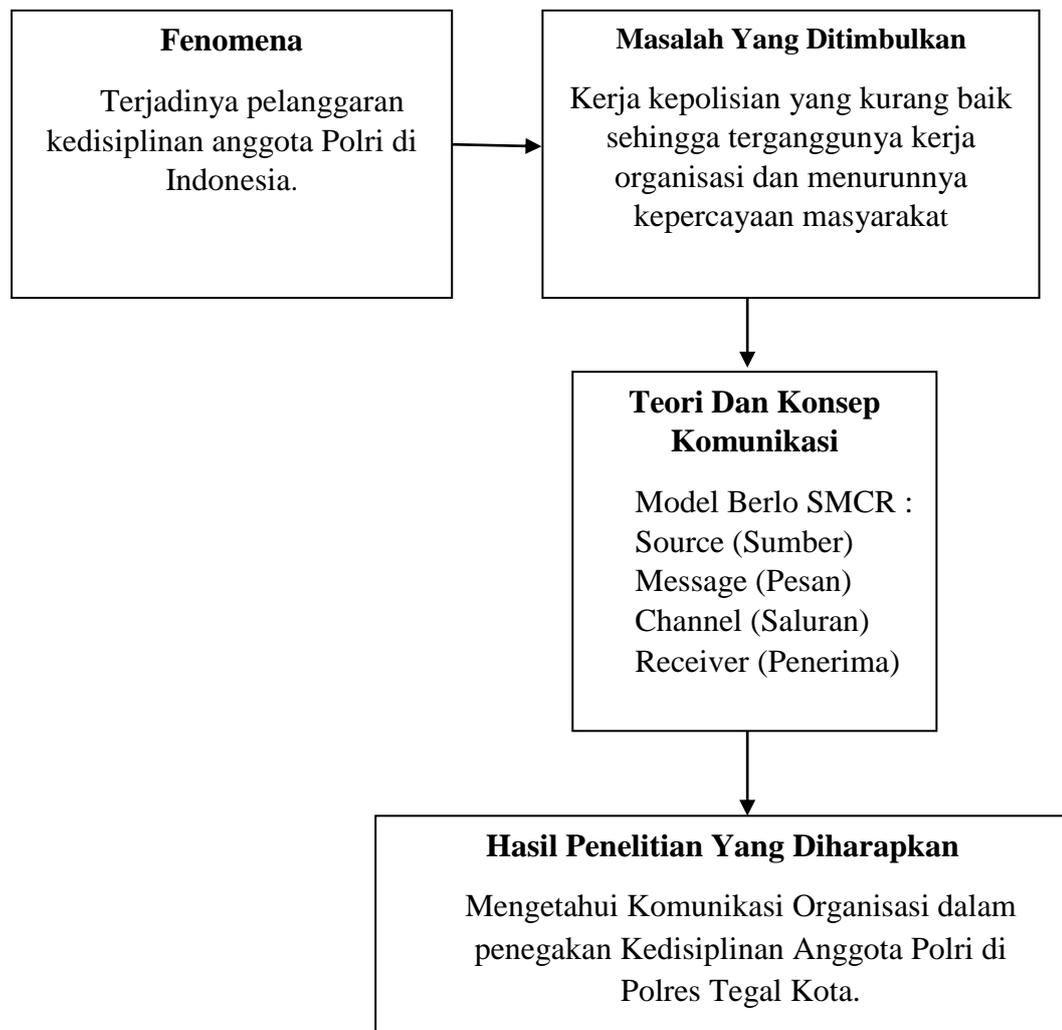
#### **II.4. Pokok-Pokok Penelitian**

Pokok penelitian merupakan terjemahan secara terinci tentang konsep-konsep yang ada dalam penelitian yang fungsinya untuk member petunjuk yang akan diteliti. Pokok-pokok penelitian yang diajukan dalam penelitian adalah bahwa Komunikasi Organisasi dalam penegakan Kedisiplinan Anggota Polri di Polres Kota Tegal diukur dari :

1. Source (Sumber)
2. Message (Pesan)
3. Channel (Saluran)
4. Receiver (Penerima)

## II.5. Alur Pikir Penelitian

Gambar 2.4 alur Pikir



## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian merupakan cara yang ditempuh peneliti dalam mengumpulkan informasi terkait Komunikasi Organisasi dalam penegakan Kedisiplinan Anggota Polri di Polres Tegal Kota baik dalam hal teknik pengumpulan data yang terbagi dua yaitu dengan cara studi pustaka dan studi lapangan, sumber data, penentuan informan serta teknik analisis yang dilakukan oleh peneliti.

Terdapat tiga istilah utama yang menentukan tentang perspektif penelitian menurut (Creswell, 2016) yaitu pendekatan penelitian, rancangan penelitian, dan metode penelitian, tiga istilah utama tersebut yang menunjukkan suatu perspektif tentang penelitian yang menampilkan informasi berurutan dari konstruksi penelitian secara luas ke prosedur metode yang sempit. Atas dasar pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa metode penelitian merupakan salah satu dari tiga istilah penting yang menampilkan informasi berurutan dari informasi yang disajikan secara luas sehingga menghasilkan prosedur metode yang sempit.

#### **III.1. Jenis Dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan data kualitatif (data yang bersifat tanpa angka-angka dan bilangan), sehingga data lebih bersifat kategori substantif yang kemudian diinterpretasikan dengan rujukan, acuan, dan referensi-referensi ilmiah. Tujuan penelitian kualitatif adalah bukan untuk mencari

sebab akibat sesuatu, tetapi hanya berupaya memahami situasi tertentu. Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang atau perilaku yang bisa diamati.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Komunikasi Organisasi dalam penegakan Kedisiplinan Anggota Polri di Polres Tegal Kota. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengungkapkan Komunikasi Organisasi dalam penegakan Kedisiplinan Anggota Polri di Polres Tegal Kota.

Metode deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrument dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang ada pada umumnya bersifat kualitatif.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini digunakan lebih banyak untuk bidang antropologi budaya; disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. (Sugiyono 2013:8)

Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada Tatar dan individu tersebut secara utuh. Dengan menggunakan metode kualitatif penulis mencari semua data yang dibutuhkan, kemudian dikelompokkan secara spesifik (Moleong, 2006:4).

Metode penelitian kualitatif memiliki sifat khas yaitu penekanan pada lingkungan yang alamiah (*naturalistic setting*), induktif (*inductive*), fleksibel (*flexible*), pengalaman langsung (*direct experience*), kedalaman (*indepth*), proses, menangkap arti, keseluruhan (*wholeness*), partisipasi aktif dari partisipan dan penafsiran (*interpretation*) (Raco, 2010:5).

### **III.2. Jenis Dan Sumber Data**

#### **III.2.1. Jenis Data**

Dalam penelitian ini diperlukan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Jenis data adalah pokok yang akan dicari dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi dan wawancara dengan narasumber dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang Komunikasi Organisasi dalam penegakan Kedisiplinan Anggota Polri di Polres Tegal Kota.

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada peneliti. Data tersebut berasal dari dokumen-dokumen, arsip serta data dan

informasi lainnya yang ada sangkutannya dengan Komunikasi Organisasi dalam penegakan Kedisiplinan Anggota Polri di Polres Tegal Kota. Data sekunder diperoleh dengan membaca buku literatur literatur, dokumen perundang-perundangan, koran, dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan masalah yang berkaitan dengan Komunikasi Organisasi dalam penegakan Kedisiplinan Anggota Polri di Polres Tegal Kota.

### III.2.2. Sumber Data

Menurut (Sugiyono, 2017) sumber data dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan sumber data sedangkan sumber data sekunder sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu dengan cara menemukan seseorang atau informan terlebih dahulu kemudian memintanya mencarikan orang yang mereka kenal dan seterusnya sampai menemukan banyak informasi yang terkait di dalam penelitian.

### III.3. Informan Penelitian

Informan adalah subyek penelitian yang bisa memberikan informasi mengenai suatu fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu (Heryana, 2018:4) :

1. Informan kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci tidak hanya mengetahui situasi/fenomena masyarakat, tetapi juga informasi dari informan kunci. Pilihan informasi kunci tergantung pada unit analisis yang akan dipelajari. Misalnya, dalam suatu unit organisasi, informan kunci adalah pimpinan organisasi tersebut.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Polres Tegal Kota. Alasan peneliti memilih Kepala Polres Tegal Kota adalah karena sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan sebagai informan utama, yaitu kepala dari Polres tegal Kota yang memiliki info menyeluruh dari permasalahan yang peneliti ambil.

2. Informan utama

Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “pelaku utama” dalam sebuah cerita. Oleh karena itu, informan utama adalah seseorang yang memiliki pemahaman teknis dan detail tentang pertanyaan penelitian yang akan dipelajari.

Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Propam Tegal Kota selaku pimpinan dalam unit kepolisian yang manangani bidang kedisiplinan internal Kepolisian Tegal Kota dan dan anggota kepolisian. Alasan peneliti mengambil informan tersebut karena memiliki informasi

secara detail tentang permasalahan yang peneliti teliti berkaitan dengan kedisiplinan anggota Kepolisian terutama dalam hal komunikasi untuk menegakkan kedisiplinan anggota kepolisian Tegal Kota.

### 3. Informan Pendukung

Informan pendukung merupakan seorang yang bisa membagikan data bonus buat memenuhi analisis serta ulasan riset kualitatif. Informan bonus membagikan data yang tidak diberikan oleh informan utama.

Dalam riset ini ada sebagian informan pendukung cocok dengan kebutuhan informasi riset serta ulasan riset. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah sebagian masyarakat Kota Tegal yang mengetahui kedisiplinan anggota Kepolisian di Polres Tegal Kota.

## **III.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

### **1. Observasi**

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam

penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi terhadap Polres Tegal Kota terkait dengan komunikasi organisasi dalam penegakan kedisiplinan.

## **2. Wawancara**

Wawancara merupakan sebuah bentuk percakapan dengan adanya maksud tertentu didalamnya. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi boleh juga dilakukan oleh peneliti apabila ingin mencari atau mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2017:232), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti berkaitan dengan Komunikasi Organisasi dalam penegakan Kedisiplinan Anggota Polri di Polres Tegal Kota.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku, gambar, dokumen resmi maupun statistik yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan terhadap bahan-bahan yang tertulis.

Dokumentasi dalam pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting yang terdapat baik di lokasi penelitian maupun di instansi yang ada hubungannya dengan lokasi penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa , materi naskah press release, dokumentasi video maupun foto.

### **III.5. Teknik dan Analisis Data**

Analisis data merupakan pengujian sistematis terhadap data untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan di antara bagian-bagian, serta hubungan bagian-bagian itu dengan keseluruhannya dengan cara mengkategorikan data dan mencari hubungan antara kategori (Spradley dalam Pawito, 2008 : 117-119). Sedangkan teknik analisis data yang diungkapkan oleh Nasution (dalam Sugiyono, 2017:245), analisa data dilakukan dengan teknik menghubungkan data yang diperoleh peneliti sebelum, selama dan setelah di lapangan.

Dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan sebuah bentuk pekerjaan peneliti dan proses mencari sampai mengorganisasikan data ke dalam bentuk sistematis, memilah-milah data-data penting guna untuk menemukan tema sehingga dapat disusun hipotesis kerja dan dibuat kesimpulan yang berguna sebagai referensi. Data-data tersebut diolah dan dieksplorasi secara mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaksi dimana komponen reduksi dalam penelitian dan disajikan dengan bersamaan dengan proses pengumpulan data penelitian.

Komunikasi Organisasi dalam penegakan Kedisiplinan Anggota Polri di Polres Tegal Kota oleh peneliti di lapangan yaitu :

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan atensi pada penyederhanaan, pengabstrakan serta transformasi informasi agresif yang timbul dari catatan- catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang riset berlangsung, bahkan saat sebelum informasi betul- betul terkumpul sebagaimana nampak dari kerangka konseptual riset, kasus riset, serta pendekatan pengumpulan informasi yang diseleksi peneliti. Reduksi informasi ialah wujud analisis yang menajamkan, menggolongkan, memusatkan, membuang yang tidak butuh, serta mengorganisasi informasi dengan metode sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir bisa diambil, reduksi informasi bisa dimaksud selaku kuantifikasi informasi.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif (Sugiyono, 2017) penyajian data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Dapat diartikan, yang paling sering digunakan

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Maka dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk narasi yang menguraikan atau menggambarkan Komunikasi Organisasi dalam penegakan Kedisiplinan Anggota Polri.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017) adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi gambar atau obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti dapat menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan pada data yang sebelumnya hanya berupa asumsi peneliti berdasarkan studi pustaka. Setelah melakukan studi lapangan asumsi tersebut akan diperbandingkan dengan asumsi sebelumnya, sehingga data yang diperoleh menjadi jelas berdasarkan informan-informan terkait.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

#### **IV.1. Gambaran umum Polres Tegal Kota**

##### **4.1.1 Sejarah singkat Polres Tegal Kota.**

Dalam suasana semangat pembangunan dewasa ini sudah sewajarnya apabila sekali lagi kita menengok kebelakang, kita temukan dari masa lalu itu betapa suatu semangat juang membela dan mempertahankan kemerdekaan yang tersimpul dalam semboyan “Merdeka atau MATI RAWE – RAWE RANTAS MALANG – MALANG PUTUNG dan SEPI ING PAMRIH RAME ING GAWE “ dan sebagainya. Mampu menghantar seluruh rakyat bangsa indonesia melewati kancah perjuangan yang sangat berat. Karena itulah maka pengungkapan ini lebih dititikberatkan pada usaha mengingatkan kembali kepada kegigihan perjuangan masa lalu, agar pembangunan yang kini kita lakukan itu sejalan dengan kegigihan para syuhadha pada saat mereka mempertaruhkan jiwa raganya.

Perang kemerdekaan telah berakhir dengan kemenangan di pihak bangsa indonesia, maka terbukalah kesempatan bagi atasan Kepolisian Negara Republik Indonesia (KKN pertama RM. Said Soekanto dan wakil KKN pertama R. Soemarto Djojonegoro) untuk menata kembali tubuhnya. Pada saat itulah struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia berubah-ubah, baik komposisi personalia maupun statusnya, seperti dialami Kepolisian Negara

Republik Indonesia di Tegal menjadi Kepolisian Kabupaten/Kota Tegal dan dipimpin oleh R. Moelyadi, Ajun Komisaris Polisi.

Pada pertengahan tahun 1961 dibawah pimpinan R. paidi.kompol I terjadi perubahan menjadi Kepolisian Kota Tegal dengan Daerah wewenang meliputi Daerah Kota Praja Tegal ditambah tiga kecamatan dalam Daerah Kabupaten Tegal (Pos Polisi kacamatan Sumurpanggang,Dukuhturi dan Kramat) masuk kedalam wewenang Kepolisian kota Tegal.

Pada antara akhir tahun 1962 menyesuaikan status Tata Praja Kota Tegal terbentuklah Pos Polisi Kecamatan Kota dipimpin M. Hadisoewito,pembantu Inspektur Polisi tk. I, berkedudukan sementara di Kantor Polisi D.P.K.N (Dinas Pengawasan Keselamatan Negara) Tegal. Dibawah pimpinan R. Hoediyono,Ajun Komisaris Besar Polisi, menjadi Komando Resort Kepolisian Kota 924 Tegal,antara dalam tahun 1964 Pos Polisi Kecamatan Kota HAPUS dan terbentuklah Komando Sektor Kepolisian Tegal Barat dan Timur, sehingga Komando Resort Kepolisian Kota 924 Tegal membawahi Lima Sektor Kepolisian. Berubah menjadi Komando Resort Kepolisian Kota 924 Tegal, ke Lima Sektor berubah menyesuaikan Komsek 924.01 Tegal Timur, 92402 Tegal Barat, 924.03 Sumurpanggang, 924.04 Dukuhturi dan 924.05 Kramat.

Sekarang menjadi Kepolisian Resort Kota Tegal, dengan adanya Pemekaran Daerah Pemda Dati II Kodya Tegal, Terbentuklah Polsek

Tegal Selatan. Sehingga Polres Kota Tegal membawahi Enam Polsek ( Tiga Polsekta dan Tiga Polsek ).

Bawasanya sebelum itu diwilayah ini, tidaklah berarti “ Tidak / Belum ada apa – apa “ sepanjang penelitian yang kami lakukan dengan seksama tersingkaplah suatu kesimpulan bahwa bentuk - bentuk Kesatuan Kepolisian yang ada diwilayah ini pada masa Revolusi “ Perang Gerilya “ kemerdekaan 1945 – 1949 seperti halnya Polisi Istimewa (MOBRIG) dipimpin R. LEGOWO, Kopol dengan gugurnya R. SUPRAPTO pada Clash ke I tanggal 21 Juli 1947 mengambil alih pucuk pimpinan Kepolisian Kota / Kabupaten Tegal bergerilya hingga *Cease Fire Order* dilimpahkan kepada R. IMAM SOMEPOYO, Kopol I, pengganti Kepala Kepolisian Kota / Kabupaten Tegal. Adalah merupakan suatu wadah yang mempersatukan Pejuang –pejuang Kepolisian di Daerah Tegal dan sekitarnya, sedangkan perubahan – perubahan yang terjadi sesudahnya merupakan konsekwensi logis dari setiap usaha penyempurnaan Organisasi Kepolisian .

#### 4.1.2 Visi Misi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Tegal Kota

Visi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resort Tegal Kota adlah “ Polri yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan

proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera”.

Misi Polri Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran Misi Polri kedepan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psykis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (Law abiding Citizenship). Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
3. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna

mencapai kesejahteraan masyarakat

5. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
6. Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.

Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika. Sasaran : Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Polri pada kurun waktu tahun 2010-2014 yang akan datang ditetapkan sasaran yang hendak dicapai adalah :

➤ Bidang Kamtibmas

- Tercapainya situasi Kamtibmas yang kondusif bagi penyelenggaraan pembangunan nasional.
- Terciptanya suatu proses penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan, bebas KKN dan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
- Terwujudnya aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan kemampuan profesional yang tinggi serta mampu bertindak tegasadil dan berwibawa.
- Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat yang meningkat yang terwujud dalam bentuk partisipasi aktif dan dinamis masyarakat terhadap upaya Binkamtibmas yang semakin

tinggi.

- Kinerja Polri yang lebih profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga disegani dan mendapat dukungan kuat dari masyarakat untuk mewujudkan lingkungan kehidupan yang lebih aman dan tertib.

➤ Bidang Keamanan Dalam Negeri

- Tercapainya kerukunan antar umat beragama dalam kerangka interaksi sosial yang intensif serta tumbuhnya kesadaran berbangsa guna menjamin keutuhan bangsa yang ber Bhineka Tunggal Ika.
- Tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Filosofi: Disimak dari kandungan nilai Pancasila dan Tribrata secara filosofi memuat nilai-nilai kepolisian sebagai abdi utama, sebagai warga negara teladan dan wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat.

#### 4.1.3 Moto Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Tegal Kota

Moto Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Tengah resort Tegal kota adalah Rastra Sewakottama yang berarti polri adalah abdi utama rakyat. sebutan ini berarti brata pertama dari tri brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup polri sejak 1 Juli 1954.

Polri tumbuh dan berkembang dari rakyat untuk rakyat memang harus berinisiatif dan bertindak sebagai pelindung dan pengayom rakyat

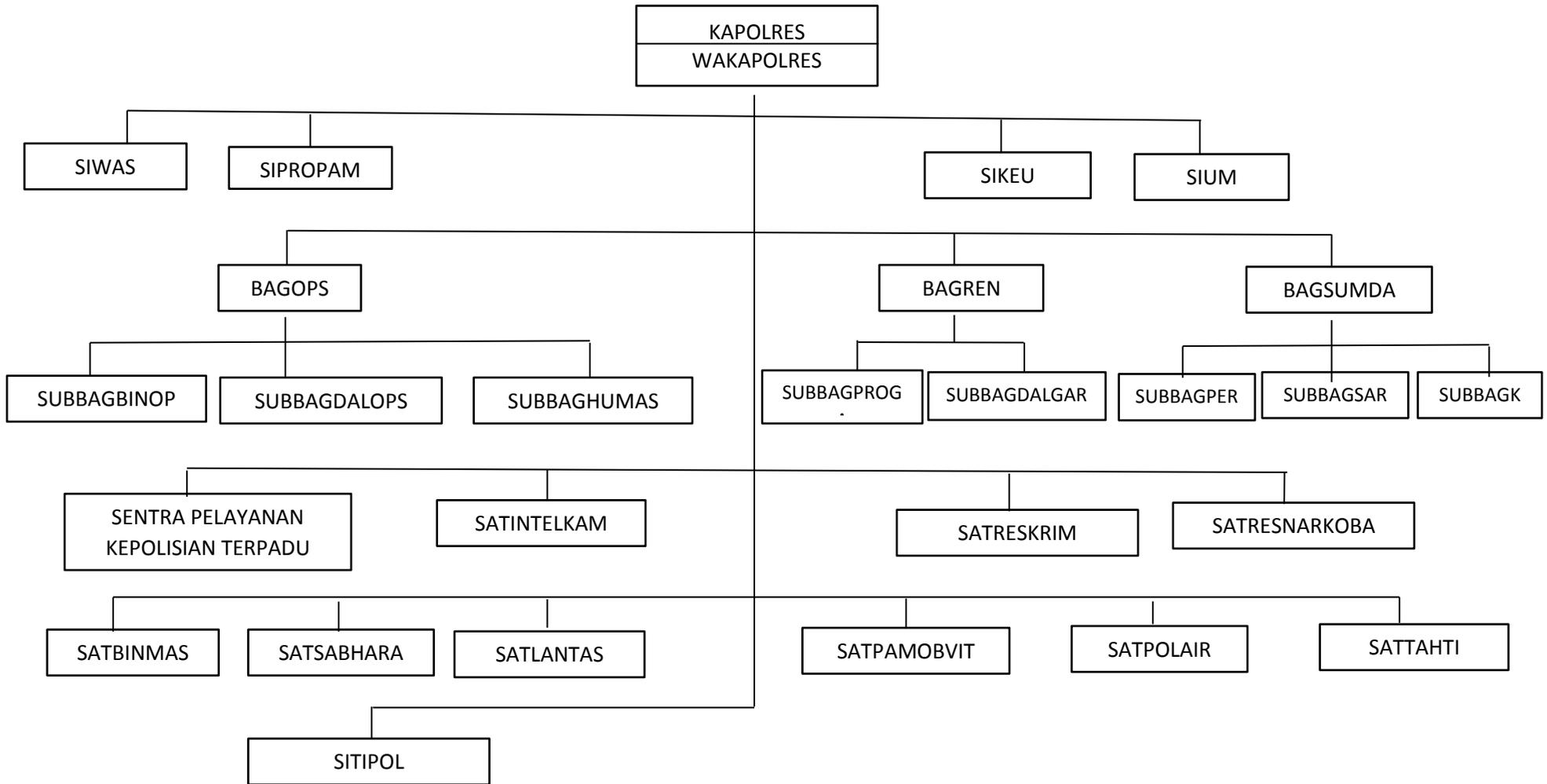
#### 4.1.4 Sumber pendanaan dan peralatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resort Tegal Kota.

Sumber pendanaan Kepolisian Resort tegal kota utamanya diupayakan dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sebagai Intansi Kepolisian, Kepolisian Resort Kota Tegal mempunyai fungsiMemberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psykis. serata Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dan Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk terselenggaranya pelaksanaan dan tugas dengan baik, maka harus tersedia peralatan kerja seperti, alat komunikasi, perlatan computer, simulator sim, peralatan penunjang berupa peralatan kantor dan pealatan militer yang meliputi senjata api, mobil water canon, alat trasportasi, dll

#### 4.1.5 Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resort Tegal Kota

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Polres Tegal Kota



Sumber : Profil Polres Tegal Kota

Berdasarkan struktur organisasi pada Gambar di atas, maka dapat dijelaskan deskripsi tugas dari masing-masing bagian, yakni :

#### 1. KAPOLRES

- 1) Kapolres adalah pimpinan Polres yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kapolda
- 2) Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan – satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya, serta memberikan pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.
- 3) Kapolres dalam melaksanakan tugas bidang Kamtibmas berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban serta ketaatan terhadap hukum oleh segenap lapisan masyarakat.

#### 2. WAKA POLRES

- 1) Waka Polres adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres.
- 2) Waka Polres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas – tugas seluruh satuan organisasi Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres

#### 3. UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN BAGIAN OPERASI

- 1) Bag Ops adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah

Kapolres.

- 2) Bag Ops bertugas merencanakan, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi operasi kepolisian, termasuk latihan pra operasi, melaksanakan koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi maupun dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat, serta melaksanakan fungsi hubungan masyarakat termasuk Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi ( PID ).
- 3) Bag Ops dipimpin oleh Kepala Bagian Operasional, disingkat Kabag Ops, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polres.

Kabag Ops dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :

- Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasional, disingkat Kasubbag Binops.
- Kepala Sub Bagian Pengendalian Operasi, disingkat Kasubbag Dalops.
- Kepala Sub bagian Hubungan Masyarakat, disingkat kasubbag Humas.

#### 4. UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN BAGIAN PERENCANAAN

- 1) Bag Ren adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres.
- 2) Bag Ren bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya,

termasuk rencana program pengembangan satuan kewilayahan.

- 3) Bag Ren dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan, disingkat Kabag Ren, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polres.
- 4) Kabag Ren dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
  - a) Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran, disingkat Kasubbag Progar.
  - b) Kepala Sub Bagian Pengendalian Anggaran, disingkat Kasubbag Dalgar.

#### 5. UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN BAGIAN SUMBERDAYA

- 1) Bag Sumda adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres.
- 2) Bag Sumda bertugas menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pembinaan dan administrasilogistik serta pelayanan bantuan dan penerapan hukum.
- 3) Bag Sumda dipimpin oleh Kepala Bagian Sumber Daya, disingkat Kabag Sumda, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polres.
- 4) Kabag Sumda dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
  - a. Kepala Sub Bagian Personel, disingkat Kasubbag Pers Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana, disingkat Kasubbag Sarpras.

b. Kepala Sub Bagian Hukum, disingkat Kasubbag Kum.

6. UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN SEKSI PENGAWASAN

- 1) Siwas adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres.
- 2) Siwas bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentik terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.
- 3) Siwas dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan, disingkat Kasiwas, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Waka Polres.
- 4) Kasiwas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
  - a. Bintara Urusan Bidang Operasional, disingkat Baur Bidops.
  - b. Bintara Urusa Bidang Pembinaan, disingkat Baur Bidbin.

7. UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN SEKSI PROPAM

- 1) Sipropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres.
- 2) Sipropam bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota

Polri, pembinaan disiplin dan tata tertib termasuk pengamanan internal dalam rangka penegakkan disiplin dan pemuliaan profesi.

- 3) Sipropam dipimpin oleh Kepala Seksi Propam, disingkat Kasi Propam, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Waka Polres.
- 4) Kasi Propam dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
  - a. Bintara Urusan Provost, disingkat Baur Provost.
  - b. Bintara Urusan Pengamana Internal, disingkat Baur Paminal.

#### 8. UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN SEKSI KEUANGAN

- 1) Sikeu adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres.
- 2) Sikeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan.
- 3) Sikeu dipimpin oleh Kepala Seksi Keuangan, disingkat Kasi Keu, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Waka Polres.
- 4) Kasi Keu dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
  - a. Bintara Urusan Administrasi, disingkat Baur Min.
  - b. Bintara Urusan Gaji, disingkat Baur Gaji.
  - c. Bintara Urusan Akuntansi dan Verifikasi, disingkat Baur Akun.
  - d. Bintara Urusan Data, disingkat Baur Data.

#### 9. UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN SEKSI UMUM

- 1) Sium adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres.
- 2) Sium bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas – tugas pimpinan yang mencakup kesekretariatan, kearsipan dan administrasi umum lainnya serta pelayanan markas di lingkungan Polres.
- 3) Sium dipimpin oleh Kepala Seksi Umum, disingkat Kasium, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Waka Polres.
- 4) Kasium dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
  - a. Bintara Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat BasubseksiMintu.
  - b. Bintara Subseksi Pelayanan Markas, disingkat Basubseksi Yanma.

#### 10. UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU

- 1) SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang terdiri dari 3 ( tiga ) unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu ( Ploeg ) yang berada di bawah Kapolres.
- 2) SPKT bertugas memberikan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan / pengaduan, pelayanan bantuan / pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan

pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

- 3) SPKT dipimpin oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, disingkat Ka SPKT, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Waka Polres.
- 4) Ka SPKT dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 3 ( tiga ) kanit.

#### 11. UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK SATUAN INTELIJEN KEAMANAN

- 1) Sat Intelkam adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres.
- 2) Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang kewanatan, termasuk perkiraan intelijen, persandian, pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin / keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ) kepada masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya.
- 3) Sat Intelkam dipimpin oleh Kepala Satuan Intelijen Keamanan, disingkat Kasat Intelkam, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Waka Polres.
- 4) Kasat Intelkam dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh

:

- a. Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaur Binops.
- b. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaur Mintu.
- c. Kepala Unit, disingkat Kanit yang terdiri dari 6 ( enam ) kanit.

## 12. UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK SATUAN RESERSE KRIMINAL

- 1) Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres.
- 2) Sat Reskrim bertugas menyelenggarakan / membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang – undangan.
- 3) Sat Reskrim dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal, disingkat Kasat Reskrim, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Waka Polres.
- 4) Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
  - a. Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaur Binops.

- b. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaur Mintu.
- c. Kepala Urusan Identifikasi, disingkat Kaur Ident.
- d. Kepala Unit, disingkat Kanit yang terdiri dari 4 ( empat ) kanit.

### 13. UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK SATUAN NARKOBA

- 1) Sat Narkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres.
- 2) Sat Narkoba bertugas menyelenggarakan / membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, serta berkoordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba.
- 3) Sat Narkoba dipimpin oleh Kepala Satuan Narkoba, disingkat Kasat Narkoba, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Waka Polres.
- 4) Kasat Nakoba dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
  - a. Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaur Binops.
  - b. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaur Mintu.
  - c. Kepala Unit, disingkat Kanit yang terdiri dari 2 ( dua) kanit

#### 14. UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT

- 1) Sat Binmas adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres.
- 2) Sat Binmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerja sama dengan instansi pemerintah / lembaga / organisasi masyarakat, pembinaan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri – Masyarakat
- 3) Sat Binmas dipimpin oleh Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat, disingkat Kasat Binmas, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Waka Polres.
- 4) Kasat Binmas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
  - a. Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaur Binops.
  - b. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaur Mintu.
  - c. Kepala Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat, disingkat Kanit Binpolmas.
  - d. Kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat, disingkat Kanit

Bintibmas.

- e. Kepala Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa, disingkat Kanit  
Binkamsa

#### 15. UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK SATUAN SAMAPTA BHAYANGKARA

- 1) Sat Sabhara adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres.
- 2) Sat Sabhara bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Samapta Bhayangkara yang mencakup tugas polisi umum, yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan objek vital, pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara ( TPTKP ), penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa, dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 3) Sat Sabhara dipimpin oleh Kepala Satuan Samapta Bhayangkara, disingkat Kasat Sabhara, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Waka Polres.
- 4) Kasat Sabhara dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
  - a. Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional, disingkat Kaur Binops.
  - b. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaur

Mintu.

- c. Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli, disingkat Kanit Turjawali.
- d. Kepala Unit Pengamanan Objek Vital, disingkat Kanit Pamobvit.
- e. Kepala Unit Pengendalian Massa, disingkat Kanit Dalmas

#### 16. UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK SATUAN LALU LINTAS

- 1) Sat Lantas adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres.
- 2) Sat Lantas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi / kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- 3) Sat Lantas dipimpin oleh Kepala Satuan Lalu Lintas, disingkat Kasat Lantas, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Waka Polres.
- 4) Sat Lantas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
  - a. Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaur Binops.
  - b. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaur Mintu.
  - c. Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli,

disingkat Kanit Turjawali.

- d. Kepala Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa, disingkat Kanit Dikyasa.
- e. Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi, disingkat Kanit Regident.
- f. Kepala Unit Kecelakaan, disingkat Kanit Laka.

#### 17. UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK SATUAN PENGAMANAN OBJEK VITAL

- 1) Sat Pamobvit adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres.
- 2) Sat Pamobvit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan objek vital yang meliputi proyek / instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu dan objek lainnya termasuk VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian.
- 3) Sat Pamobvit dipimpin oleh Kepala Satuan Pengamanan Objek Vital, disingkat Kasat Pamobvit, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Waka Polres.
- 4) Kasat Pamobvit dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
  - a. Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaur Binops.
  - b. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaur Mintu.
  - c. Kepala Unit Pengamanan Kawasan Tertentu, disingkat Kanit

Pamwaster.

d. Kepala Unit Pengamanan Pariwisata, disingkat Kanit Pamwisata

#### 18. UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK SATUAN KEPOLISIAN PERAIRAN

- 1) Sat Polair adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres.
- 2) Sat Polair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakkan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta pencarian dan penyelamatan kecelakaan di perairan (SAR).
- 3) Sat Polair dipimpin oleh Kepala Satuan Kepolisian Perairan, disingkat Kasat Polair, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Waka Polres.
- 4) Kasat Polair dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
  - a. Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaur Binops.
  - b. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaur Mintu.
  - c. Kepala Unit Patroli, disingkat Kanit Patroli.
  - d. Kepala Unit Penagakkan Hukum, disingkat Kanit Gakkum.
  - e. Kepala Unit Kapal, disingkat Kanit Kapal

#### 19. UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK SATUAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI

- 1) Sat Tahti adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di

bawah Kapolres.

- 2) Sat Tahti bertugas menyelenggarakan pelayanan perawatan dan kesehatan tahanan, termasuk pembinaan jasmani dan rohani, serta menerima, menyimpan dan memelihara barang bukti, yang didukung dengan penyelenggaraan administrasi umum yang terkait sesuai bidang tugasnya.
- 3) Sat Tahti dipimpin oleh Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti, disingkat Kasat Tahti, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Waka Polres.
- 4) Kasat Tahti dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
  - a. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaur Mintu.
  - b. Bintara Unit Perawatan Tahanan, disingkat Banit Wattah.
  - c. Bintara Unit Barang Bukti, disingkat Banit Barbuk

## 20. UNSUR PENDUKUNG SEKSI TEKNOLOGI KEPOLISIAN

- 1) Sitipol adalah unsur pendukung Polres yang berada di bawah Kapolres.
- 2) Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan teknologi informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.
- 3) Sitipol dipimpin oleh Kepala Seksi Teknologi Kepolisian, disingkat Kasitipol, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Waka Polres.

- 4) Kasitipol dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
  - a. Bintara Urusan Administrasi, disingkat Baur Min.
  - b. Bintara Urusan Teknologi dan Komunikasi, disingkat Baur Tekkom.
  - c. Bintara Urusan Teknologi dan Informasi, disingkat Baur Tekinfo.

#### 4.1.6. Kondisi Polres Tegal Kota Saat Ini

Sejalan dengan adanya reformasi birokrasi Polri yang pada intinya menghendaki perlu adanya suatu perubahan pada tubuh Polri baik perubahan yang menyangkut aspek struktural, aspek kultural maupun aspek instrumental dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Perubahan dari aspek instrumental ditandai adanya penyempurnaan atau pembaharuan berbagai piranti lunak atau aturan – aturan yang ada / berlaku pada Polri dan mengatur tentang mekanisme kerja atau hubungan kerja antar pejabat di lingkungan Polri, baik ditingkat Mabes, Polda, Polres dan Polsek.

Pelaksanaan tugas Polri dapat dilaksanakan dengan baik tentu karena adanya komunikasi atau hubungan antar fungsi secara sinergi dan berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan, hal tersebut perlu disusun Hubungan dan Tata Cara Kerja ( HTCK ) dilingkungan Polres.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang KePolisian Negara Republik Indonesia :

1. Kep. Kapolri Nomor : Kep/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres).

2. Keputusan KaPolri No. Pol. : Kep / 44 / X / 2005, tanggal 31 Desember 2005 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara republik Indonesia.
3. Surat Keputusan KaPolda Jabar No. Pol. : Skep / 571 A / XI / 2003 tanggal 8 Nopember 2003, tentang Naskah sementara hubungan dan Tata cara kerja di lingkungan Polda Jabar.
4. Keputusan Kapolri Nomor : Kep / 425 / VII / 2010 tanggal 5 Juli 2010, tentang Pedoman Penyusunan hubungan dan tata cara Kerja (HTCK) di lingkungan Polri.

Sebagai pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Tegal Kota Dipimpin Oleh Akbp Rully Thomas, S.H., S.I.K., M.I.K. menggantikan Kapolres terdahulu Akbp Jaka Wahyudi, S.H., S.I.K., M.Si. yang masa jabatannya berakhir pada bulan Desember 2023 pergantian jabatan sering terjadi di institusi Kepolisian, karena menyesuaikan kebutuhan organisasi atas perintah Kapolri sesuai undang - undang

Kepolisian Jumlah personil anggota Polri di Polres Tegal Kota adalah 509 anggota, dan 41 anggota PNS Polres Tegal Kota yang meliputi unsur pimpinan, unsur pengawas dan pembantu pimpinan, dan unsur pelaksana tugas pokok. Semua jajaran Polres secara melekat dalam pelaksanaan tugas anggota sehingga tugas yang akan dicapai sesuai dengan program dan anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan hubungan pimpinan dengan anggota terjalin secara sinergi sehingga dapat menghindari adanya penyimpangan – penyimpangan anggota dalam pelaksanaan tugasnya.